

**IMPLEMENTASI KONSEP *VALUE FOR MONEY*
DALAM PENILAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:
Nailatul Karimah
NIM : 212105030078

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2025**

**IMPLEMENTASI KONSEP *VALUE FOR MONEY*
DALAM PENILAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

Nailatul Karimah
NIM : 212105030078

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
FEBRUARI 2025**

**IMPLEMENTASI KONSEP VALUE FOR MONEY
DALAM PENILAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

Nailatul Karimah

NIM : 212105030078

Disetujui Pembimbing

Prof. Dr. Khamdan Rifa'i S.E., M.Si., CHRA.

NIP : 196808072000031001

**IMPLEMENTASI KONSEP *VALUE FOR MONEY*
DALAM PENILAIAN KINERJA KEUANGAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah (S. Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Februari 2025

Tim Penguji

Ketua


Ana Pratiwi, M.S.A.

NIP. 198809232019032003

Sekretaris


Muzayyin S.E.I. M.E.

NIP. 197808142023211011

Anggota :

1. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M. ()

2. Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si., CHRA. ()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.

NIP. 196812261996031001

MOTTO

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Artinya : Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain.¹



¹ Surah Asy-Syu'ara' - 181-183 - Quran.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan kata Alhamdulillah serta segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan tepat waktunya. Sebagai tanda ucapan terima kasih dari saya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Priyo Utomo dan Ibunda tersayang, Ibu Satima yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat, serta kasih sayang yang tulus kepada penulis, dan tak lupa kerja keras bapak dan do'a ibu sehingga penulis dapat mencapai pada titik ini dalam memperoleh gelar sarjana.
2. Kepada kakak penulis Retno Susanti S.Pd., M.Pd yang selalu menjadi motivasi penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Sahabat Penulis Nida Putri Sundusiah, Terima kasih telah menghibur, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi.
4. Kepada ke lima sahabat penulis Nanda, Shinta, Icha, Silvi dan Lenny Terima kasih atas kesan menarik selama masa perkuliahan sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan fase skripsi ini bersama.
5. Terima kasih kepada teman semasa kecil penulis Zakiyah Qotrun Nada tak terfikir oleh penulis kita telah sampai pada fase ini dalam menyelesaikan skripsi bersama.
6. Kepada Rekan – rekan AKS 3 2021, yang telah bersama penulis hingga kita sama – sama sampai pada titik ini.

7. Kepada Rekan – rekan KKN Posko 70 Dusun Gencono serta Masyarakat Gencono khususnya Bapak Yayak, Alm Bapak Edi, Ibu Pit dan Ibu Siti Terima kasih atas dukungan serta do'a yang telah diberikan.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Alfito Yoga Pratama. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu maupun support pada penulis, terima kasih juga karna telah bersedia menemani, mendampingi serta mendengar keluh kesah penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
9. Terakhir untuk diri saya Nailatul Karimah, saya ucapkan banyak – banyak Terima kasih karna tak kenal lelah, pantang semangat agar dapat membahagiakan Kedua Orang Tua karna telah mencapai pada titik ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan itu memang tidak terlepas dari kodratnya manusia. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. H. M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, M. Ak, selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Prof. Dr Khamdan Rifa'i S.E., M.Si., CHRA selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
6. Ibu Siti Indah Purwaning Yuwana, S.Si., MM selaku Dosen Penasehat Akademik.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya yang telah memberi ilmu kepada penulis sehingga dapat mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya dan mendapat pengetahuan yang luas.
8. Semua pihak yang sudah membantu dari memulai penelitian sampai selesai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, semoga segala amal baik dari berbagai pihak yang telah bapak atau ibu dan teman-teman berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada berbagai pihak sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya supaya lebih baik daripada penelitian yang penulis lakukan.

Jember, 30 Januari 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Nailatul Karimah, Khamdan Rifa’i, 2025 : Implementasi Konsep *Value For Money* Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember.

Kata Kunci : *Value For Money*, Kinerja Keuangan

Value For Money adalah konsep pengelolaan keuangan organisasi sektor publik yang mendasarkan kepada tiga elemen yakni ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Oleh karena itu dengan diterapkannya ketiga elemen *Value For Money* diharapkan pengelolaan keuangan pada sektor publik berjalan dengan optimal, sehingga dalam penggunaan sumber daya dapat menghasilkan *output* yang maksimal dengan biaya yang minimal.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember Jika Diukur Dengan Konsep *Value For Money*? 2) Apa Dampak Penerapan Konsep *Value For Money* Terhadap Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja keuangan apabila diukur dengan konsep *Value For Money* serta mengetahui dampak dari penerapan konsep *Value For Money* pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data menggunakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021 sampai dengan 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) tahun 2021 sampai dengan 2024.

Penelitian ini sampai bahwa simpulan: 1) Kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember pada aspek ekonomi, di kategorikan ekonomis. Pada aspek efisiensi di kategorikan efisien dan pada aspek efektifitas di kategorikan efektif. 2) Dampak penerapan konsep *Value For Money* pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember yakni sangat signifikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34

C. Subjek Penelitian.....	35
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35
E. Analisis Data.....	36
F. Keabsahan Data.....	38
G. Tahap-tahap Penelitian.....	39
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	41
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	41
B. Penyajian Data dan Analisis.....	45
C. Pembahasan Temuan.....	48
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan	69
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Mapping Kajian Terdahulu	21
Tabel 3. 1 Kriteria Ekonomis	38
Tabel 3. 2 Kriteria Efisiensi	39
Tabel 3. 3 Kriteria Efektivitas	39
Tabel 4. 1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan DPMD Jember Tahun Anggaran 2021-2024	47
Tabel 4. 2 Laporan Realisasi Belanja Daerah DPMD Jember Tahun Anggaran 2021-2024	48
Tabel 4. 3 Rasio Ekonomis DPMD Jember Tahun 2021-2024	53
Tabel 4. 4 Rasio Efisiensi DPMD Jember Tahun 2021-2024	56
Tabel 4. 5 Rasio Efektivitas DPMD Jember Tahun 2021-2024	58

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur DPMD Jember Struktur Organisasi Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.....46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Akuntansi sektor publik berkaitan dengan penerapan dan perlakuan akuntansi dalam organisasi publik. Ruang lingkup akuntansi ini lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta atau bisnis, karena mencakup berbagai entitas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.² Peran akuntansi sektor publik yakni guna mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, serta memastikan pelayanan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.³ Salah satu aspek penting yang semakin mendapat perhatian masyarakat adalah kinerja instansi pemerintah, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan kebutuhan publik.

Oleh karena itu salah satu hal yang harus diatur dengan teliti dalam pemerintahan yakni pengelolaan anggaran dan keuangan. Peran pemerintah sangat penting dalam menggerakkan pengembangan perekonomian.⁴ Sejak diterapkannya konsep anggaran berbasis kinerja, perhatian pemerintah dalam pengelolaan keuangan semakin difokuskan pada pencapaian hasil yang diukur secara efisien dalam penggunaan anggaran. Baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk menghasilkan kinerja keuangan yang optimal.

² Haryanto dkk, Akuntansi Sektor Publik, Perpustakaan Nasional, 2017.

³ Moch Chotib, "KINERJA DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER" 7, no. 2 (2017): 2588–93.

⁴ Nikmatul Masruroh And Suprianik Suprianik, "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif," *Global Education Journal* 1, No. 2 (2023): 73–85, <https://doi.org/10.59525/Gej.V1i2.136>.

Hal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.⁵ Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini penting guna menjaga kestabilan ekonomi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dengan pengelolaan yang baik akan menjadikan alokasi sumber daya yang tepat serta meminimalisir potensi penyalahgunaan.

Selain itu, hal ini juga berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan ekonomi, dengan menjamin bahwa setiap kebijakan publik dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dimana dalam ekonomi kerakyatan guna mewujudkan pengelolaan sumber daya yang baik kedepannya.⁶ Oleh sebab itu, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan terutama dalam pengelolaan keuangan, harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Hal ini bertujuan dalam memastikan tercapainya tujuan atas akuntabilitas publik serta optimalisasi penggunaan sumber daya.

Maka dari itu, organisasi publik terkhusus pada pemerintah perlu atas memperkuat pengendalian internal guna terjadi peningkatan kinerja keuangan

⁵ Kemenkeu, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia," *Kemenkeu.Go.Id*, 2013.

⁶ Erina Setiana Putri and Nur Ika Mauliyah, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal," *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 2, no. 2 (2022): 108–17, <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i2.3603>.

supaya mencapai pada tingkat kinerja yang diinginkan. Pengendalian internal yang rendah akan mempengaruhi faktor kinerja sehingga berjalan tidak maksimal, dimana akan mempengaruhi hasil dari implementasi keuangan, berdasarkan peristiwa ini menimbulkan perhatian pada kalangan masyarakat mengenai apakah kinerja pemerintah telah sebanding dengan anggaran yang dialokasikan, dimana tujuan utama dalam organisasi yakni untuk menghasilkan keuntungan atau profit yang memadai guna mencapai atas pengurangan biaya serta meningkatkan nilai efisiensi.

Pengukuran itu dilihat akan seberapa jauh kinerja yang dihasilkan oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu yang dibanding atas hal yang telah direncanakan di awal. Kinerja keuangan tersebut menjadi salah satu hal penting guna mengkaji dan menjadi tolak ukur dalam rangka memperoleh citra pemerintahan yang baik.⁷

Pemerintah harus memastikan kinerja pekerjaan yang baik, baik dalam hal penyelesaian tugas atau alokasi sumber daya. Anggaran yang dialokasikan pemerintah pada tiap penyelenggaraan atas kegiatan diharapkan agar dapat terealisasi dengan baik dan dipergunakan pada program kegiatan yang menjadi kepentingan dari organisasi untuk memperoleh dan memberi manfaat pencapaian kinerja. Selain itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, dengan memastikan bahwa setiap alokasi dana yang digunakan dikelola secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁷ Ana Pratiwi and Fitriatul Muqmiroh, "Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 2, no. 2 (2022): 114–25, <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1465>.

Oleh sebab itu, dengan adanya pengukuran kinerja dapat menjadikan patokan keberhasilan suatu organisasi. Pengukuran kinerja merupakan tolak ukur atas keberhasilan yang dicapai atas program maupun kegiatan perusahaan.⁸ Pengukuran kinerja tersebut sebagai tolak ukur atas sistem anggaran berbasis kinerja atau prestasi kerja, yang diutamakan guna menilai kewajaran anggaran biaya suatu program atau kegiatan. Pengukuran kinerja ini merupakan fungsi dan referensi atas penetapan tolak ukur suatu kinerja. Besarnya target akan ditentukan oleh durasi waktu dan hasil evaluasi kinerja.

Evaluasi kinerja merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai serta mencerminkan keberhasilan. Dalam hal ini, tugas dan tanggung jawab pemerintah menjadi semakin kompleks serta senantiasa siap menghadapi evaluasi kinerja.⁹ Menganalisis keuangan pemerintah publik pula dapat menjadi salah satu indikator untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam mengevaluasi pencapaian target serta realisasi penerimaan beserta pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja, mencakup sisi *input*, *output*, dampak, hingga manfaatnya.

Untuk melihat suatu instansi pemerintah telah menjalankan pelayanan publik yang memadai maka dibutuhkan evaluasi kinerja. Salah satu cara yang dapat dipertimbangkan untuk evaluasi kinerja tersebut yakni konsep *Value For Money* dengan perhitungan rasio di dalamnya yang merupakan alat untuk menganalisis laporan keuangan. *Value for Money* merupakan suatu konsep

⁸ Fresila Hana Fauziah, Program Studi Akuntansi, and Akie Rusaktiva Rustam, "Reaksi 01.10.2023" 2, no. 4 (2023): 907–21.

⁹ Luthfia Ayu Karina and Wahyu Ramadhani, "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value for Money Pada Blud Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong," *Value* 2, no. 2 (2022): 71–82, <https://doi.org/10.36490/value.v2i2.214>.

dalam pengelolaan organisasi sektor publik yang berfokus pada tiga elemen utama yakni ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga elemen tersebut, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, memiliki peran penting dalam proses pengelolaan.¹⁰

Elemen pertama, yaitu ekonomi, berkaitan dengan perolehan *input* dalam kualitas beserta kuantitas tertentu yang dipergunakan dengan menekankan pada harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara *input* beserta nilai *input*. Elemen ini juga menekankan kemampuan organisasi sektor publik untuk meminimalkan penggunaan sumber daya input dengan menghindari pemborosan atau pengeluaran yang berlebihan.

Elemen kedua, yaitu efisiensi, merujuk pada kemampuan menghasilkan output maksimum dengan penggunaan input seminimal mungkin untuk mencapai output yang ditargetkan. Efisiensi merupakan perbandingan antara output beserta input yang diukur melalui standar kinerja maupun target yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator efisiensi.

Elemen ketiga merupakan efektivitas, dimana pada elemen ini merujuk atas tingkatan pencapaian hasil pada organisasi sesuai atas target pada perencanaan awal. Secara sederhana, efektivitas merupakan suatu perbandingan antara outcome beserta output, dari ketiga elemen diatas dipergunakan untuk penilaian suatu kinerja keuangan.

Salah satu instansi yang akan diukur tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas yakni pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten

¹⁰ Mardiasmo., Akuntansi Sektor Publik (Yogyakarta: ANDI, 2002), hlm. 4.

Jember, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember menjadi perhatian publik atas transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang dilaksanakan. Apakah pemerintah telah melaksanakan kinerja sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini memiliki tugas untuk mendukung kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.¹¹ Peran pemerintah desa juga sangat penting dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember terdiri dari beberapa bagian, yaitu Sekretariat dan empat bidang lainnya, yang meliputi bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pengelolaan keuangan desa, bidang pemerintahan desa, serta bidang sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat. Sebagai instansi yang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mengelola anggaran yang signifikan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan.

Alasan peneliti tertarik meneliti karena anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember memiliki dampak signifikan terhadap pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan semakin terbatasnya sumber daya, penting bagi pemerintah mengeksplorasi konsep

¹¹ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, "KSOTK DPMD 2023.Pdf," n.d.

Value For Money dalam pengelolaan anggaran, guna memastikan setiap alokasi dana dapat memberikan manfaat maksimal. Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan kontribusi pada literatur ilmiah mengenai anggaran publik serta menawarkan solusi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi, ekonomis serta keefektifitasan dalam pengelolaan anggaran.

Berdasarkan deskripsi diatas dan kondisi yang ada, peneliti tertarik untuk menyelidikinya **“Implementasi Konsep *Value For Money* Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jember“**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada pada diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember jika diukur berdasarkan tiga elemen *Value for Money*, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas ?
2. Apa dampak penerapan konsep *Value for Money* terhadap kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember apabila diukur dengan tiga elemen *Value for Money*, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

2. Untuk mengetahui dampak penerapan konsep *Value for Money* terhadap kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terdiri dari kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesainya penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian dengan judul "Implementasi Konsep *Value for Money* dalam Penilaian Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa" adalah untuk memperkaya literatur terkait penerapan konsep *Value for Money* dalam sektor publik, khususnya dalam penilaian kinerja keuangan instansi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Konsep ini diterapkan dalam pengelolaan keuangan pemerintah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi konsep tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan atau mengevaluasi penerapan *Value for Money* dalam berbagai konteks lembaga publik, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat praktis bagi peneliti dalam penelitian ini adalah mendapatkan pengalaman langsung dalam menganalisis penerapan konsep *Value for Money* pada kinerja keuangan instansi pemerintah, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

b. Manfaat Bagi Instansi

Manfaat praktis bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dari penelitian ini adalah sebagai panduan dalam meningkatkan kinerja keuangan melalui penerapan konsep *Value for Money*, yang menekankan pada efektivitas, efisiensi, dan ekonomi dalam pengelolaan anggaran.

E. Definisi Istilah

1. Kinerja

Kinerja (performance) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atas kebijakan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.¹²

¹² Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 122.

2. *Value For Money*

Value For Money adalah sebuah konsep keuangan sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga elemen tersebut mempunyai dampak yang signifikan terhadap proses pengelolaan keuangan.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan rangkaian pendahuluan yang isinya terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan rangkaian kajian kepustakaan yang membahas dan berisi tentang penelitian terdahulu serta kajian teori yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu penilaian kinerja keuangan dengan konsep *Value For Money* pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Bab III merupakan rangkaian metode penelitian dimana pada bab ini menjelaskan dan berisikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap – tahap penelitian.

Bab IV adalah rangkaian penyajian data dan analisis yang didalamnya membahas dan berisikan mengenai data-data yang didapatkan, dimana data tersebut akan dihitung berdasarkan konsep *Value For Money* dan kemudian dianalisis. Pada bab ini juga membahas tentang bagaimanakah kinerja

¹³ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 4.

Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember jika diukur dengan konsep *Value For Money* beserta dampaknya.

Bab V berupa bab penutup dimana didalamnya berisi mengenai kesimpulan atas penelitian dan juga pembahasan terkait pada permasalahan yang diuraikan serta saran bagi semua belah pihak yang terkait dengan kinerja keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember jika diukur oleh konsep *Value For Money*.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian terdahulu oleh Natanail Andrian. Universitas Bina Sarana Informatika, dengan judul Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan Metode *Value For Money* Pada Pemprov DKI Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait kondisi keuangan, yang menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan yang tepat. Studi ini menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama tiga tahun anggaran menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan berfokus pada penerapan konsep *value for money*, yang mencakup aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam kinerja sektor publik. Berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada periode 2020-2022, kinerja dinilai cukup ekonomis dan efektif dengan nilai analisis berada pada kisaran 80%-90%. Selain itu, kinerja juga dinilai efisien dengan nilai analisis berada di rentang 90%-100%.¹⁴

Untuk kesamaan penelitian ini keduanya sama-sama menggunakan konsep Value For Money dalam menilai kinerja keuangan. Untuk perbedaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitian dimana

¹⁴ Media Ekonomi et al., "Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan Metode Value For Money Pada Pemprov DKI Jakarta Media Ekonomi Dan Bisnis" 1 (2024): 1-6.

peneliti terdahulu menggunakan metode kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif.

2. Penelitian terdahulu oleh Nditra Marta. Universitas Padjajaran Indonesia, dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Pendekatan *Value For Money* Pada Pt Perkebunan Nusantara Viii.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa PT Perkebunan Nusantara VIII mencatatkan anggaran kerugian pada setiap periode dalam laporan keuangannya. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kinerja operasional yang terkait dengan kegiatan usaha komoditas perkebunan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana data berbentuk angka dijadikan tolok ukur untuk memberikan informasi yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Perkebunan Nusantara VIII, berdasarkan konsep *value for money*, dinilai ekonomis, efisien, dan efektif dengan rata-rata nilai sebesar 90%.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan peneliti terletak pada metode penelitian yakni sama-sama menggunakan metode kuantitatif sebagai tolok ukur untuk mengemukakan keterangan terkait kinerja keuangan, perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya terletak pada objek penelitian dimana peneliti meneliti pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember sedangkan peneliti sebelumnya pada PT Perkebunan Nusantara VIII.

¹⁵ Administrasi Keuangan Publik, Fakultas Ilmu, and Ilmu Politik, "Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Pendekatan Value For Money Pada PT Perkebunan Nusantara VIII" 7 (n.d.).

3. Penelitian terdahulu oleh Rhomadiningsih Defi, dengan judul *Value For Money* dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.

Penelitian ini bertujuan guna pengevaluasian kinerja organisasi publik yang diterapkan berdasarkan nilai konsep *value for money*, yang mencakup tiga aspek utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pendekatan yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui pengukuran dan observasi yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar pada tahun 2019-2022 belum memenuhi kriteria ekonomis, efisien, beserta efektif.¹⁶

Persamaan dari penelitian ini dengan peneliti terletak pada metode penelitian dimana sama-sama menggunakan metode kuantitatif sebagai tolak ukur kinerja keuangan, perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya yakni pada objek penelitian.

4. Penelitian terdahulu oleh Matulatuwa Antagracea. Politeknik Negeri Ambon, dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Hasil dari penelitian merupakan pengukuran atas terjadinya kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang diukur melalui konsep *Value For Money* berdasarkan ketiga elemennya yakni segi ekonomis, efisiensi beserta efektivitas. Metode yang dilakukan

¹⁶ Defi Rhomadiningsih, "Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Blitar" 6, no. 3 (2024): 288–303.

adalah deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Hasil studi menunjukkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan konsep *value for money* tergolong cukup baik dalam segi keefektifan, efisiensi dan ekonomis.¹⁷

Untuk kesamaan penelitian ini keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Untuk perbedaan dari penelitian ini terletak objek penelitian dimana peneliti sebelumnya mengarah kepada pemerintah daerah sedangkan peneliti mengarah pada pemerintah desa.

5. Penelitian terdahulu oleh Novita Yulia. Universitas Riau, dengan judul *Analisis Value For Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru*.

Hasil penelitian yakni Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam penyusunan suatu laporan keuangan yang berisikan laporan realisasi anggaran pendapatan serta belanja lalu dipublis kepada masyarakat guna pertanggung jawaban atas pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Metode yang dilakukan yakni Analisis data secara deskriptif kuantitatif yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Hasil studi menunjukkan kinerja Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dikatakan efektif dan ekonomis karena memiliki persentase

¹⁷ Antagracea Matulatuwa et al., "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah," *Journal of Applied Accounting (Jaa)* 3, no. 1 (2024), <https://journal.isas.or.id/index.php/JAA>.

dibawah 100%, namun tidak efisien karena mengalami penurunan presentase.¹⁸

Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti terletak pada anggaran yang dirujuk untuk pemrograman penanggulangan covid 19 sedangkan peneliti merujuk pada biaya operasional kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan untuk persamaan, sama-sama menggunakan tiga komponen *Value for Money* yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk dijadikan pengukuran kinerja keuangan.

6. Penelitian terdahulu oleh Ayu Luthfia, dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep *Value For Money* Pada Blud Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong.

Penelitian ini mengkaji atas kinerja keuangan yang berada pada organisasi sektor publik yang disana diterapkannya sebuah konsep *Value for Money* pada BLUD Puskesmas Murung Pudak dalam kurun waktu 2016-2020. Penilaian tersebut dilakukan atas perbandingan komponen laporan kinerja berdasarkan sebuah pemantauan atas fluktuasi kinerja dari pengukuran tiga elemen utama, berupa rasio ekonomi, rasio efisiensi, dan juga pula rasio efektivitas. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pada organisasi sektor publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan BLUD Puskesmas Murung Pudak berdasarkan Rasio Efisiensi mengalami

¹⁸ Raisya Zenita G.Yulia Novita Sari, Satria Tri Nanda, Ika Berty, "Analisis Value for Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru," *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 1 (2022): 56–65.

penurunan dan masuk dalam kategori tidak efisien (inefisiensi) dari tahun 2016 hingga 2020, disebabkan oleh tingginya anggaran belanja yang didominasi oleh barang dan jasa. Namun, berdasarkan Rasio Efektivitas, kinerja secara keseluruhan termasuk dalam kategori efektif.¹⁹

Persamaan peneliti terdahulu dan peneliti yakni dari metode pengumpulan data, sama-sama menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Untuk perbedaan, yakni terletak pada objek penelitian.

7. Penelitian terdahulu oleh Utama Nyoman. Universitas Samawa, dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep *Value For Money* (Studi di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat).

Penelitian ini mengungkapkan bahwa rendahnya kinerja sektor publik disebabkan oleh masalah dalam aspek perencanaan dan pengelolaan. Implementasi Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, yang berisikan atas penilaian suatu kinerja keuangan menjadi standar atas penilaian kinerja keuangan dari daerah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, di mana data yang diperoleh berupa angka-angka.²⁰

Hasil studi menunjukkan bahwa ketiga rasio yang dianalisis memiliki kinerja yang baik. Rasio Ekonomi dengan kriteria sangat ekonomis, mencapai lebih dari 105%, rasio efisiensi dengan kriteria

¹⁹ Luthfia Ayu Karina and Wahyu Ramadhani, "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value for Money Pada Blud Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong," *Value* 2, no. 2 (2022): 71–82, <https://doi.org/10.36490/value.v2i2.214>.

²⁰ I Nyoman Utama, Fani Fatona, and Nining Sudiyarti, "ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY (Studi Di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)," *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen* 2, no. 2 (2022): 193–200, <https://doi.org/10.58406/samalewa.v2i2.1020>.

sangat efisien, mencapai lebih dari 100% dan rasio efektivitas dengan kriteria efektif, berada di kisaran 90%-100%.

Persamaan peneliti terdahulu dan peneliti yakni dari metode pengumpulan data, sama-sama menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Untuk perbedaan, yakni terletak pada objek penelitian.

8. Penelitian terdahulu oleh William Gerald, dengan judul Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode *Value For Money* Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.

Hasil dari penelitian untuk mengetahui kinerja keuangan dengan metode *Value for Money* pada Badan Pengelola Keuangan Kota Manado. Metode penelitian yakni deskriptif kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk penjelasan secara jelas dan terperinci. Studi hasil dari penelitian ini adalah Kinerja keuangan dengan metode value for money pada Badan Keuangan dan Aset Daerah kota Manado sangat baik dan berpedoman pada tiga prinsip, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.²¹

Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu pada metode penelitian yakni kuantitatif deskriptif. Untuk perbedaan dari penelitian ini terletak di fokus penelitian dimana penelitian ini memfokuskan kepada evaluasi kinerja keuangan dimana mencakup dua kegiatan yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan kepada penilaian kinerja dimana membandingkan hasil pengukuran sifat atau

²¹ Gerald William Sanger, Hendrik Manossoh, and Claudia W. M. Korompis, "Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 6, no. 2 (2023): 1193–1202.

objek dengan suatu acuan yang relevan sehingga diperoleh kuantitas suatu objek.

9. Penelitian terdahulu oleh Wini Karina, dengan judul Penerapan Konsep *Value For Money* Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil dari penelitian Pemerintah yakni memberi dana anggaran yang cukup atas perangkat daerah dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang penyelenggaraan pada Pemerintah Daerah, sehingga pada akhirnya organisasi perangkat daerah tersebut tersoroti dalam hal kinerja. Metode penelitian yang dipakai berupa metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif yang berguna untuk menjelaskan akan suatu hal atau lebih atas peristiwa yang terjadi secara sistematis dan juga akurat. Hasil studi Kinerja keuangan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi dikatakan ekonomis dan efisien karena berada pada rentang rasio 90%-100%, namun dikatakan sangat efektif dikarenakan dalam pelaksanaan program dan juga kegiatan instansi tersebut telah mencapai target sasaran beserta tujuannya.²²

Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu pada metode penelitian yakni kuantitatif deskriptif. Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yakni terletak pada tempat penelitian dimana peneliti terdahulu meneliti pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan sedangkan peneliti pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

²² Cynthia Alkalah, "Penerapan Konsep Value For Money Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah" 19, no. 5 (2016): 1-23.

10. Penelitian terdahulu oleh Maryanti Susi, dengan judul *Analisis Value For Money* Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019.

Hasil penelitian mengukur kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2015- 2019 dengan memakai analisis *value for money*. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi Pemerintah Kota Surabaya masih kurang dari segi efisien dan ekonomis namun cukup dalam kriteria efektif.²³

Untuk kesamaan penelitian ini keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Untuk perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti sebelumnya mengarah pada pemerintah daerah sedangkan peneliti mengarah kepada pemerintah desa.

Guna memberikan gambaran komprehensif dibawah ini dipaparkan mapping penelitian sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Mapping Kajian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1	Natanail Andrian (2024) dengan judul Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan Metode <i>Value For Money</i> Pada Pemprov DKI Jakarta.	Untuk perbedaan dari penelitian ini terletak pada metode penelitian.	Untuk kesamaan penelitian ini keduanya sama-sama menggunakan konsep <i>Value For Money</i> .
2	Nditra Marta (2024), dengan judul Analisis Kinerja Keuangan	Untuk perbedaan dari penelitian ini terletak pada objek penelitian.	Untuk kesamaan penelitian ini keduanya sama-

²³ C Susi Maryanti and Agus Munandar, “Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019,” *Jurnal Ilmiah MEA* 5, no. 3 (2021): 2888–89.

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
	Menggunakan Pendekatan <i>Value For Money</i> Pada Pt Perkebunan Nusantara Viii.		sama menggunakan metode kuantitatif.
3	Penelitian terdahulu oleh Rhomadiningsih Defi (2024), dengan judul <i>Value For Money</i> dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar.	Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti terletak pada objek penelitian.	Untuk persamaan, sama-sama menggunakan metode kuantitatif deskriptif.
4	Penelitian terdahulu oleh Matulatuwa Antagracea (2024) Politeknik Negeri Ambon, dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.	Untuk perbedaan dari penelitian ini terletak pada tempat penelitian dimana peneliti sebelumnya mengarah kepada pemerintah daerah sedangkan peneliti mengarah pada pemerintah desa.	Untuk kesamaan penelitian ini keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif.
5	Penelitian terdahulu oleh Novita Yulia (2022) Universitas Riau, dengan judul Analisis <i>Value For Money</i> Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.	Perbedaan dari penelitian ini dengan peneliti terletak pada anggaran yang dirujuk untuk pemrograman penanggulangan covid 19 sedangkan peneliti merujuk pada biaya operasional kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Untuk persamaan, sama-sama menggunakan tiga komponen <i>Value for Money</i> yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk dijadikan pengukuran kinerja keuangan
6	Penelitian terdahulu oleh Ayu Luthfia (2021) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep <i>Value For</i>	Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti yakni pada objek penelitian.	Untuk persamaan, sama-sama menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
	<i>Money</i> Pada Blud Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong.		
7	Penelitian terdahulu oleh Utama Nyoman (2022) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep <i>Value For Money</i> (Studi di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)	Perbedaan peneliti terdahulu dan peneliti yakni objek penelitian.	Untuk persamaan, sama-sama menggunakan metode kuantitatif deskriptif.
8	Penelitian terdahulu oleh William Gerald (2023) dengan judul Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode <i>Value For Money</i> Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Manado.	Untuk perbedaan dari penelitian ini terletak di fokus penelitian dimana penelitian ini memfokuskan kepada evaluasi kinerja keuangan dimana mencakup dua kegiatan yaitu kegiatan pengukuran dan penilaian. Sedangkan peneliti lebih memfokuskan kepada penilaian kinerja dimana membandingkan hasil pengukuran sifat atau objek dengan suatu acuan yang relevan sehingga diperoleh kuantitas suatu objek.	Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu pada metode penelitian yakni kuantitatif deskriptif.
9	Penelitian terdahulu oleh Wini Karina (2021) dengan judul Penerapan Konsep <i>Value For Money</i> Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.	Perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti yakni terletak pada tempat penelitian dimana peneliti terdahulu meneliti pada Dinas Perkebunan Dan Peternakan sedangkan peneliti pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.	Persamaan peneliti dengan peneliti terdahulu pada metode penelitian yakni kuantitatif deskriptif.

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
10	Penelitian terdahulu oleh Maryanti Susi (2021) dengan judul Analisis <i>Value For Money</i> Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019.	Untuk perbedaan dari penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dimana peneliti sebelumnya mengarah pada pemerintah daerah sedangkan peneliti mengarah kepada pemerintah desa.	Untuk kesamaan penelitian ini keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif.

B. Kajian Teori

1. Kinerja

Kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan, rencana, dan kebijakan guna mencapai tujuan, sasaran, visi, serta misi organisasi sesuai dengan perencanaan strategis organisasi.²⁴ Istilah kinerja pula digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan individu maupun kelompok. Secara umum, kinerja mencerminkan hasil atau pencapaian yang diharapkan oleh sebuah organisasi.²⁵

Kinerja adalah ukuran keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan, rencana, dan kebijakan untuk mencapai tujuan, sasaran, visi, serta misi organisasi sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.²⁶

Konsep kinerja ini tidak hanya mencakup pencapaian yang bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitas hasil yang dicapai oleh organisasi. Dengan

²⁴ Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru (Yogyakarta: ANDI, 2018), 151

²⁵ Yunita Maharani and Rafika Sari, "Konsep Value For Money Untuk Pengukuran Kinerja Pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang," *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan* 2, no. 1 (2021): 97, <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i1.1919>.

²⁶ G.Yulia Novita Sari, Satria Tri Nanda, Ika Berty, "Analisis Value for Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru."

demikian, kinerja menjadi cerminan dari efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi.²⁷

Selain itu, istilah kinerja juga digunakan untuk menggambarkan tingkat keberhasilan individu atau kelompok dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.²⁸ Dalam konteks organisasi, kinerja individu atau kelompok dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses yang dijalani untuk mencapai hasil tersebut, sehingga bisa memberikan insight mengenai area yang perlu diperbaiki.²⁹

Secara umum, kinerja mencerminkan hasil atau pencapaian yang diharapkan oleh sebuah organisasi dalam mencapai visi dan misinya. Oleh karena itu, pengukuran kinerja yang objektif dan terukur sangat penting untuk memastikan bahwa organisasi berada di jalur yang tepat dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dengan adanya sistem evaluasi yang jelas, organisasi dapat terus meningkatkan kinerjanya, baik dalam hal produktivitas maupun kualitas, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kepuasan pemangku kepentingan dan keberlanjutan organisasi.

Penilaian kinerja dapat dilakukan jika individu atau kelompok memiliki kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai. Tanpa adanya tujuan atau

²⁷ Versiandika Yudha Pratama, Syamsuddin, and Farah Difa, "Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan," *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 2 (2022): 149–55, <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.411>.

²⁸ Y Yulitiawati and R Rusmidarti, "Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU," *Jetap*, 2021, 91–109, <http://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/view/966%0Ahttps://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/download/966/640>.

²⁹ Sutarna, Fatona, And Sudiarti, "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value For Money (Studi Di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)."

target, kinerja tidak dapat diukur karena tidak ada acuan yang menjadi tolak ukur keberhasilannya.

Penilaian kinerja merupakan metode untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.³⁰ Metode ini digunakan untuk mencatat dan mengevaluasi pencapaian kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui perkembangan organisasi serta mendukung peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Al-Qur'an juga menekankan bahwa setiap apa dikerjakan akan mendapatkan apa yang diperbuat dari usaha dan pelaksanaan kerja. Hal ini diterangkan dalam Surah An-Najm Ayat 39, sebagai berikut :

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya”³¹

Ayat tersebut mengajarkan bahwa seseorang hanya akan mendapatkan hasil dari apa yang dia usahakan. Dalam konteks kinerja, yakni harus bekerja keras dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang baik.

³⁰ Melta Idriska, Novi Mubyarto, and Efni Anita, “Analisis Pengukuran Value for Money Pada Apbdes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo,” *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 2, no. 1 (2023): 53–66, <https://doi.org/10.56444/transformasi.v2i1.363>.

³¹ <https://quran.nu.or.id/>, “Surat Al-An’am Ayat 15: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” n.d., <https://quran.nu.or.id/al-an%27am/15>.

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menilai pencapaian strategi melalui alat ukur finansial.³² Penilaian ini dilakukan dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan kinerja aktual, lalu menganalisis selisih atau perbedaannya. Oleh karena itu, pengukuran kinerja harus searah dengan strategi organisasi, karena tujuan utama dari penilaian kinerja adalah untuk mengevaluasi akuntabilitas organisasi.

Pengukuran kinerja adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian strategi melalui alat ukur finansial.³³ Penilaian ini dilakukan dengan cara membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan kinerja aktual yang tercapai, lalu menganalisis perbedaan atau selisih antara keduanya. Dengan demikian, pengukuran kinerja memungkinkan organisasi untuk memahami sejauh mana sumber daya yang dikeluarkan memberikan hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini juga memberikan gambaran apakah anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif dan efisien.

Selain itu, pengukuran kinerja harus selaras dengan strategi organisasi untuk memastikan bahwa tujuan utama evaluasi, yaitu meningkatkan akuntabilitas, dapat tercapai. Penilaian kinerja yang baik tidak hanya melihat angka-angka finansial, tetapi juga mempertimbangkan

³² Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 152

³³ Ahmad Irfansyah and Jumania Septariani, "Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Melalui Pendekatan Value for Money," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah* 5, no. 1 (2022): 17–36, <https://doi.org/10.51877/jiar.v5i1.212>.

dampak jangka panjang dari penggunaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, penting bagi setiap organisasi untuk melakukan evaluasi kinerja secara teratur, sehingga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan memberikan manfaat maksimal bagi semua pemangku kepentingan.

Pengukuran kinerja juga harus didasarkan pada karakteristik operasional organisasi. Hal ini diperlukan guna mendefinisikan indikator serta pengukuran kinerja yang digunakan. Indikator kinerja terdapat tiga jenis yakni diantaranya pengeluaran (*output*), akibat (tujuan fungsional) serta dampak (*outcome* atau tujuan akhir). Suatu pengukuran kinerja yang didasarkan atas karakteristik operasional bermanfaat guna mengukur tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas suatu pelaksanaan kegiatan.

Dalam hal ini manfaat dari penilaian kinerja yakni :

- a. Membantu memperjelas tujuan organisasi.
- b. Mengevaluasi target akhir atau *outcome* yang dihasilkan.
- c. Yakni sebagai masukan dalam penentuan skema insentif manajerial.
- d. Memungkinkan bagi jasa pelayanan instansi pemerintah dalam menentukan pilihan.
- e. Yakni menentukan standar kinerja serta keefektivitasan.
- f. Membantu dalam penentuan aktivitas yang memiliki efektivitas biaya yang paling baik guna mencapai target sasaran.
- g. Membantu menunjukkan wilayah, bagian maupun proses potensial guna diterapkannya penghematan biaya.

3. *Value For Money*

Value for Money adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berfokus pada tiga elemen utama: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ketiga elemen ini memiliki peran krusial dalam proses pengelolaan kinerja keuangan organisasi.³⁴ *Value for Money* menjadi tolak ukur dalam pengelolaan anggaran belanja organisasi dengan menilai sejauh mana ekonomis, efisiensi dan efektivitas telah dicapai.

Value for Money adalah konsep yang diterapkan dalam pengelolaan organisasi sektor publik yang menekankan pada tiga elemen utama: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.³⁵ Ketiga elemen ini berperan penting dalam menilai kinerja keuangan suatu organisasi dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal. *Value for Money* berfungsi sebagai alat ukur dalam mengelola anggaran dengan cara mengevaluasi sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan biaya yang efisien dan hasil yang efektif.

Selain itu, penerapan *Value for Money* membantu organisasi sektor publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Dengan adanya evaluasi terhadap aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, pengelola anggaran dapat memastikan bahwa setiap dana yang dikeluarkan memberikan nilai terbaik bagi masyarakat.

³⁴ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, 5.

³⁵ I Putu Ekayana I Dewa Ayu Putri Wirantari, "Evaluasi Pengukuran Kinerja Anggaran Biro Organisasi Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 38–50, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/46048%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/download/46048/41298>.

Hal ini juga meminimalkan potensi pemborosan dan memastikan bahwa anggaran digunakan untuk kepentingan yang paling relevan dan mendesak, sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Berikut adalah pengertian dari masing-masing elemen tersebut:

- a. Ekonomis merupakan perolehan nilai *input* dengan kualitas serta kuantitas tertentu, dengan mengandalkan pada minimalisir penggunaan dana. Ekonomis sendiri merupakan perbandingan atas *input* dengan *input value* atas satuan moneter. Ekonomis pula terkait atas sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan, dengan menghindari pemborosan atas dana yang dikeluarkan.
- b. Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* terendah guna mencapai *output* tertentu, efisiensi pula merupakan perbandingan antara *output* serta *input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau disebut target yang telah ditetapkan.
- c. Efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil atas target yang ditetapkan. Secara sederhana efektifitas merupakan sebuah perbandingan atas *outcome* dengan *output*.

Dapat disimpulkan bahwa dalam konsep *value for money* merupakan ekonomis (hemat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam arti bahwa penggunaan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif (berhasil guna) dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran.

4. Pengukuran Konsep *Value For Money*

Dalam pengukuran *Value for Money*, tingkat *input*, *output*, dan *outcome* perlu diketahui terlebih dahulu untuk dapat menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengukuran kinerja keuangan maupun non-keuangan. *Value for Money* sendiri menjadi inti dari evaluasi kinerja dalam organisasi pemerintahan.³⁶

Dalam mengukur konsep *Value for Money*, penting untuk terlebih dahulu mengetahui tingkat *input*, *output*, dan *outcome*. Hal ini diperlukan agar dapat mengevaluasi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengukuran kinerja baik keuangan maupun non-keuangan dengan menggunakan metode *Value for Money*. Konsep ini menjadi dasar utama dalam menilai kinerja organisasi pemerintahan, karena dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana sumber daya yang dikelola menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Selain itu, penerapan metode *Value for Money* dalam sektor publik memungkinkan adanya transparansi yang lebih baik dalam penggunaan anggaran. Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut *input*, *output*, dan *outcome* dapat ditentukan apakah hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta apakah penggunaan sumber daya sudah dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan nilai

³⁶ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 163.

yang maksimal bagi masyarakat dan meminimalisir pemborosan dalam pengelolaan keuangan publik.

Untuk memastikan penilaian kinerja organisasi dilakukan secara objektif, diperlukan indikator kinerja yang ideal, yaitu yang terkait dengan pengukuran konsep *Value For Money*. Kualitas pelayanan mencakup kesesuaian dengan tujuan yang ditetapkan, konsistensi, serta kepuasan publik dan masyarakat. Tujuan yang diinginkan masyarakat mencakup akuntabilitas dalam penilaian kinerja keuangan berdasarkan konsep *Value for Money*, yang meliputi ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan meminimalkan *input* untuk hasil yang optimal, serta efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berikut indikator-indikator yang digunakan sebagai dasar dalam pengukuran *Value for Money*.

- a. *Input* yakni sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, program dan aktivitas.
- b. *Output* merupakan hasil yang dicapai suatu program, aktivitas dan kebijakan.
- c. *Outcome* merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu.

Langkah-langkah pengukuran *Value For Money* didasari oleh tiga elemen diantaranya, pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

a. Ekonomi

Pada rasio ekonomi mengukur sejauh mana sumber daya (dana, tenaga kerja, bahan, dan peralatan) diperoleh dengan harga terendah tanpa mengorbankan kualitas dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value (Rp)}} \times 100\%$$

Input: Realisasi anggaran belanja

Input value: Target Anggaran belanja

Tabel 2. 3
Kriteria Ekonomis

Rasio Ekonomis Kriteria	Kriteria Ekonomis
100%-Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80% -90%	Cukup Ekonomis
60% -80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No.600.900.327 tahun 1996

b. Efisiensi

Pada rasio efisiensi ini menilai atas hubungan *input* (sumber daya yang digunakan) serta *output* (hasil atau produk yang dihasilkan) dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Output: Realisasi Anggaran Belanja

Input: Realisasi Pendapatan.

Tabel 2. 4
Kriteria Efisiensi

Rasio Efisiensi Kriteria	Kriteria Efisiensi
100%-Keatas	Sangat Efisiensi
90%-100%	Efisiensi
80%-90%	Cukup Efisiensi
60%-80%	Kurang Efisiensi
Kurang dari 60%	Tidak Efisiensi

Sumber: Kepmendagri No.600.900.327 tahun 1996

c. Efektivitas

Pada rasio efektivitas berkaitan dengan sejauh mana *output* yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dimana, segi efektivitas melihat apakah hasil akhir sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Outcome: Realisasi Pendapatan

Output: Anggaran Pendapatan

Tabel 2. 5
Kriteria Efektifitas

Rasio Efektivitas Kriteria	Kriteria Efektivitas
100%-Keatas	Sangat Efektivitas
90%-100%	Efektivitas
80%-90%	Cukup Efektivitas
60%-80%	Kurang Efektivitas
Kurang dari 60%	Tidak Efektivitas

Sumber: Kepmendagri No.600.900.327 tahun 1996

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada hakikatnya yakni cara ilmiah yang bertujuan memperoleh data yang relevan sesuai terhadap tujuan serta manfaat penelitian.³⁷ Setiap penelitian memiliki tujuan spesifik serta manfaat yang diharapkan, sehingga metode yang digunakan harus sesuai dengan penelitian tersebut, untuk menjawab permasalahan penelitian dan mencapai hasil yang diinginkan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana data yang digunakan berupa informasi yang dianalisis secara naratif, penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif karena memiliki tujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.³⁸ Proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data, yang kemudian disusun secara sistematis. Setelah itu, data dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yakni dengan teori konsep *Value For Money* berupa rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

B. Lokasi Penelitian

Berisikan tempat penelitian dilakukan. Untuk lokasi penelitian bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yang beralamat di Jl. Jawa, Tegal Boto Lor, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur

³⁷ D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013. 2.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. 4.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yakni mencakup jenis serta sumber informasi yang digunakan dalam analisis kinerja keuangan berdasarkan konsep *Value for Money*. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, yang dijadikan dasar dalam menilai aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penilaian kinerja keuangan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2021 sampai dengan 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) tahun 2021 sampai dengan 2024.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan data sekunder, berupa data yang diperoleh dari dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2021 sampai dengan 2024 yakni dokumen yang mencatat realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Tahun 2021 sampai dengan 2024 yakni dokumen yang berisikan anggaran pendapatan yang memuat alokasi dana guna berbagai kegiatan instansi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengolah dan menganalisis dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) guna mengetahui kinerja keuangan serta dampaknya berdasarkan konsep *Value for Money*. Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan sejauh mana prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

E. Analisis Data

Indikator *value for money* pada pengukuran kinerja keuangan terdiri dari tiga yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Berikut cara menghitung dari ketiga indikator tersebut :

1. Ekonomi

Pada rasio ekonomi mengukur sejauh mana sumber daya (dana, tenaga kerja, bahan, dan peralatan) diperoleh dengan harga terendah tanpa mengorbankan kualitas.³⁹ Yakni dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value (Rp)}} \times 100\%$$

Input: Realisasi anggaran belanja

Input value: Target Anggaran belanja

³⁹ Wakhid Yuliyanto et al., "Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan 'Value For Money' Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas 'X' Di Sektor Publik.," *Jurnal E-Bis* 7, no. 1 (2023): 233–45, <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1183>.

Tabel 3. 4
Kriteria Ekonomis

Rasio Ekonomis Kriteria	Kriteria Ekonomis
100%-Keatas	Sangat Ekonomis
90%-100%	Ekonomis
80%-90%	Cukup Ekonomis
60%-80%	Kurang Ekonomis
Kurang dari 60%	Tidak Ekonomis

Sumber: Kepmendagri No.600.900.327 tahun 1996

2. Efisiensi

Pada rasio efisiensi ini menilai atas hubungan *input* (sumber daya yang digunakan) serta *output* (hasil atau produk yang dihasilkan).⁴⁰ Yakni dengan pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Output: Realisasi Anggaran Belanja

Input: Realisasi Pendapatan

Tabel 3. 5
Kriteria Efisiensi

Rasio Efisiensi Kriteria	Kriteria Efisiensi
100%-Keatas	Sangat Efisiensi
90%-100%	Efisiensi
80%-90%	Cukup Efisiensi
60%-80%	Kurang Efisiensi
Kurang dari 60%	Tidak Efisiensi

Sumber: Kepmendagri No.600.900.327 tahun 1996

⁴⁰ Francelin Alexandria Lintang et al., "Evaluasi Pengukuran Kinerja Anggaran Biro Organisasi Sekertariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money The Bureau Of North Sulawesi Regional Secretariat Organizations Based On The Concept Of Value For Money," *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi ...* 6, no. 2 (2023): 1401–16, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/46048%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/download/46048/41298>.

3. Efektivitas

Pada rasio efektivitas berkaitan dengan sejauh mana *output* yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dimana segi efektivitas melihat apakah hasil akhir sesuai dengan target atau sasaran yang diinginkan.⁴¹

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Outcome: Realisasi Pendapatan

Output: Anggaran Pendapatan

Tabel 3. 6
Kriteria Efektivitas

Rasio Efektivitas Kriteria	Kriteria Efektivitas
100%-Keatas	Sangat Efektivitas
90%-100%	Efektivitas
80%-90%	Cukup Efektivitas
60%-80%	Kurang Efektivitas
Kurang dari 60%	Tidak Efektivitas

Sumber: Kepmendagri No.600.900.327 tahun 1996

F. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan pendekatan pemeriksaan kredibilitas data melalui validasi dokumen dan analisis konsistensi informasi.⁴² Data yang digunakan berasal dari sumber resmi, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2021–2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) tahun 2021–2024, yang disusun berdasarkan regulasi yang berlaku pada Dinas

⁴¹ Indah Permata Sukma and Asep Muslihat, “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Dengan Menggunakan Metode Value For Money,” *Akuntansi* 45 4, no. 2 (2023): 374–83, <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1279>.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang akurat, objektif, serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan runtutan pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh data yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahapan penelitian ini terdiri dari tiga tahap utama, yaitu Tahap Pra-Lapangan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Pelaporan.

1. Tahap pra lapangan

Tahap ini merupakan persiapan awal sebelum penelitian dilaksanakan. Pada tahap ini, peneliti menyusun rencana penelitian yang mencakup tujuan penelitian, pemilihan lokasi, penyusunan jadwal penelitian, serta perencanaan pengumpulan dan analisis data. Selain itu, peneliti juga melakukan studi awal dengan meninjau dokumen yang akan digunakan dalam penelitian guna memahami konteks serta substansi data yang akan dianalisis. Karena penelitian ini dilakukan di luar kampus, peneliti juga mengurus perizinan kepada instansi terkait guna memperoleh akses terhadap data yang diperlukan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini merupakan proses utama dalam penelitian, yakni meliputi pengumpulan, pengelolaan, serta analisis data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, di mana peneliti meneliti Laporan

Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2021–2024 beserta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) tahun 2021–2024 yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. Setelah data terkumpul, dilakukan pengelolaan data dengan menyusun informasi secara sistematis agar memudahkan dalam proses analisis. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengolah kedua data tersebut guna menilai kinerja keuangan beserta dampaknya sesuai terhadap penerapan konsep *Value for Money* berdasarkan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam kinerja keuangan.

3. Tahap Pelaporan

Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah penyusunan laporan hasil penelitian. Setelah proses pengumpulan dan analisis data selesai, peneliti menyusun laporan yang memuat hasil temuan, pembahasan, serta kesimpulan yang diperoleh dari penelitian. Laporan ini disusun secara sistematis sesuai dengan kaidah akademik dan penelitian ilmiah, sehingga dapat menjadi referensi dalam penilaian kinerja keuangan berdasarkan konsep *Value for Money*.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebuah instansi yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki tugas yakni dalam membantu kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dimana tugas serta fungsi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan mengimplementasikan birokrasi sesuai dengan Perundang-undangan.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember terdiri atas beberapa bagian, di antaranya Sekretariat dan juga empat bidang lainnya. Keempat bidang tersebut meliputi atas Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, Bidang Pemerintahan Desa, beserta Bidang Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat. Setiap bidang yang berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember memiliki tugas pokok serta fungsi yang mendukung pelaksanaan program kerja dinas guna

meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat desa dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sendiri memiliki tujuan guna menguatkan kemandirian Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa melalui optimalisasi potensi yang ada. Konsep pembangunan ini yang berfokus pada rakyat terutama dalam penempatan inisiatif beserta kreativitas dari masyarakat bersama Pemerintahan Desa sebagai subjek utama pembangunan, yang berkesinambungan pada kemakmuran serta kesejahteraan material dan juga spiritual yang tujuan atas hal yang ingin dicapai. Pembangunan yang berbasis pada potensi sumber daya manusia desa bertujuan untuk menjadikan masyarakat desa sebagai subjek yang aktif, bukan hanya sebagai objek.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember, sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bawah Pemerintah Kabupaten Jember, memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 21 Tahun 2023. DPMD berperan sebagai sektor utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan peran strategis dalam membangun keberdayaan dan partisipasi masyarakat serta pemerintahan desa. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemandirian masyarakat desa di Kabupaten Jember, yang diharapkan dapat berkontribusi pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di daerah tersebut.

2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

a. Visi DPMD Jember

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 menjelaskan bahwa visi pembangunan Kabupaten Jember adalah “Wes Wayahe Mbenahi Jember Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember”

b. Misi DPMD Jember

Misi Pembangunan meliputi:

a. Mengentaskan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar lainnya.

b. Meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan desa.

c. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah.

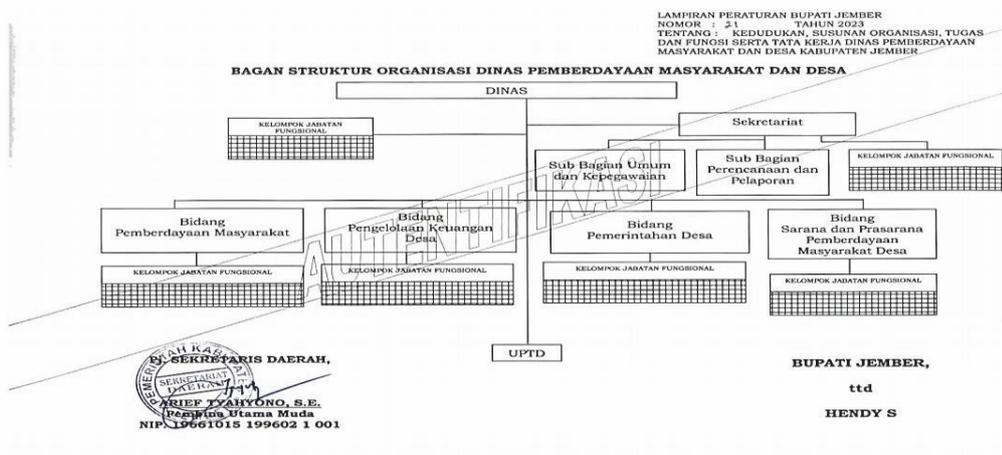
Berdasarkan visi dan misi tersebut, pembangunan di Kabupaten Jember dilaksanakan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada masyarakat (*people-centered development*). Strategi ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat (*participatory-based development*) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada masyarakat, terutama melalui ekonomi kerakyatan, untuk mencapai kemandirian dan daya saing yang lebih baik.

1. Lokasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten berlokasi di Jl. Jawa, Tegal Boto Lor, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121, Indonesia.

2. Struktur Organisasi

Setiap instansi baik instansi pemerintah maupun swasta memiliki struktur organisasi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember juga memiliki struktur organisasi yang sudah ditetapkan. Dalam struktur organisasi ditetapkan tugas – tugas dan wewenang serta tanggung jawab antar pegawai dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dan juga bagaimana hubungan satu dengan yang lainnya. Struktur organisasi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur DPMD Jember
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Jember

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Jika Diukur dengan Konsep *Value For Money*

Tabel 4. 6
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan DPMD Jember
Tahun Anggaran 2021-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	25.494.775.671	21.949.577.176	86,69%
2022	20.908.545.736	17.809.845.367	85,18%
2023	18.432.138.752	16.234.831.257	88,08%
2024	18.376.904.764	15.673.409.467	85,29%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Jember

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa data persentase Value for Money dalam kurun waktu empat tahun yang berpersentasekan 86,09% pada tahun 2021, 85,18% pada tahun 2022, 88,08% pada tahun 2023 serta 85,29% pada tahun 2024 menunjukkan atas fluktuasi dalam kinerja keuangan. Kinerja ini merupakan tingkat keberhasilan atas pelaksanaan tugas, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bahwasannya persentase dari tahun ke tahun ini mencerminkan tingkat pencapaian atas penggunaan anggaran publik dengan prinsip ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, dengan menggunakan kriteria pada analisis data pada tabel 3.1, 3.2, dan 3.3. Secara keseluruhan, pola perhitungan ini menjadi indikator bahwa instansi terus melakukan evaluasi serta perbaikan dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan operasionalnya.

Tabel 4. 7

**Laporan Realisasi Belanja Daerah DPMD Jember
Tahun Anggaran 2021-2024**

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	15.500.295.282,00	12.754.259.875,92	82,28%
2022	18.621.475.367,00	16.514.547.719,00	88,69%
2023	15.925.921.582	14.974.680.204,00	94,02%
2024	15.673.409.467	14.320.442.093,00	91,37%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Jember

Data biaya realisasi anggaran belanja yang menunjukkan persentase yang mencerminkan nilai efisiensi, efektivitas, serta ekonomis atas pengelolaan sumber daya dalam biaya pada instansi selama beberapa tahun terakhir, dengan kriteria sesuai dengan analisis data pada tabel 3.1, 3.2, dan 3.3. Nilai persentase yang tercatat, seperti 82,28% pada tahun 2021, 88,69% pada tahun 2022, 94,02% pada tahun 2023, dan 91,37% pada tahun 2024, memberikan gambaran bahwasannya instansi dapat mengendalikan serta mengalokasikan dana anggaran belanja daerah. Nilai pada persentase ini juga mengindikasikan adanya peningkatan dalam pengelolaan biaya yang sejalan dengan upaya perbaikan dalam pengelolaan keuangan publik.

2. Dampak Penerapan Value For Money di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

Penerapan konsep Value for Money memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Dampak pengukuran atas anggaran pendapatan pada tahun 2021, nilai persentase mencapai 86,69%, yang menunjukkan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan kinerja guna mencapai hasil yang maksimal. Persentase ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti dampak pandemi COVID-19 yang menghambat operasional instansi.

Pada tahun 2022, nilai persentase mengalami penurunan menjadi 85,18%, yang mencerminkan adanya tantangan dalam optimalisasi anggaran serta pengelolaan sumber daya. Meski demikian, instansi terus berupaya meningkatkan perencanaan atas program agar tetap memenuhi pengimplementasian indikator konsep Value for Money, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Pada tahun 2023, nilai persentase meningkat menjadi 88,08%, menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan kinerja keuangan. Nilai ini mengindikasikan bahwa target dan sasaran instansi telah tercapai dengan baik, dengan pengelolaan anggaran yang lebih mendekati prinsip Value for Money.

Pada tahun 2024, persentase mencapai 85,29%, terdapat penurunan, namun tetap berprinsip pada konsep Value For Money, yang menunjukkan atas pemanfaatan anggaran.

Dampak pengukuran atas anggaran belanja pada tahun 2021 menunjukkan bahwa dengan persentase biaya operasional sebesar 82,28%, instansi menghadapi kendala yang cukup signifikan dalam pengelolaan

anggaran operasional. Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama dampak pandemi COVID-19, yang menghambat kinerja keuangan.

Pada tahun 2022, persentase biaya operasional meningkat menjadi 88,69%, menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan anggaran. Instansi berhasil mengatasi hambatan yang ada pada tahun sebelumnya dengan melakukan penyesuaian kebijakan serta membentuk strategi pengelolaan biaya yang lebih optimal.

Pada tahun 2022, persentase biaya operasional meningkat menjadi 88,69%, menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan dalam pengelolaan anggaran. Instansi berhasil mengatasi hambatan yang ada pada tahun sebelumnya dengan melakukan penyesuaian kebijakan serta membentuk strategi pengelolaan biaya yang lebih optimal.

Pada tahun 2024, persentase biaya operasional tercatat sebesar 91,37%, yang mencerminkan adanya peningkatan signifikan dalam pengelolaan biaya operasional dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan demikian, data biaya anggaran belanja ini menunjukkan atas pencapaian kinerja atas keberhasilan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang semakin efisien, efektif serta ekonomis sesuai dengan indikator Value For Money.

C. Pembahasan Temuan

1. Kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember jika diukur dengan indikator konsep *Value For Money*.

a. Rasio Ekonomis

Pengukuran tingkat ekonomis merupakan evaluasi terhadap biaya yang dikeluarkan oleh sektor publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁴³ Tingkat ekonomis dinilai berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dan target anggaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat ekonomis pula merupakan suatu pengelolaan keuangan dengan melihat suatu perbandingan atas realisasi anggaran belanja dengan target anggaran yang diukur dari nilai presentase tingkat pencapaian.⁴⁴ Pada indikator ekonomi menekankan atas pengelolaan sumber daya atau anggaran agar tidak ada pemborosan dalam pengelolaan dana anggaran.

Jika hasilnya melebihi 100%, anggaran dianggap sangat ekonomis. Untuk hasil dalam rentang 90%-100%, anggaran dinilai ekonomis. Sementara itu, jika hasilnya berada antara 80%-90%, anggaran dianggap cukup ekonomis. Hasil dalam kisaran 60%-80% menunjukkan anggaran kurang ekonomis, sedangkan hasil di bawah 60% mengindikasikan anggaran tidak ekonomis.

⁴³ Kurnia Anggrahiny, Ma'ruf Sya'ban, and Rieska Maharani, "Analisis Penilaian Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Untuk Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Surabaya," *Sustainable* 1, no. 2 (2021): 286, <https://doi.org/10.30651/stb.v1i2.10843>.

⁴⁴ Dian Mawardi, Kuku Harianto, and Mawar Ratih Kusumawardani, "Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Bappeda Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017-2021 Menggunakan Konsep Value for Money," *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 4 (2022): 72-80, <https://doi.org/10.55606/jekombis.v1i4.611>.

Berikut hasil pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *Value For Money* pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021-2024 dari segi Ekonomis.

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{realisasi anggaran belanja}}{\text{target anggaran belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{12.754.259.875,92}{15.500.295.282,00} \times 100\%$$

$$= 82,28\%$$

Hasil sebesar 82,28% menunjukkan bahwa instansi telah menggunakan 82,28% dari anggaran yang dialokasikan. Dalam perspektif Akuntansi Sektor Publik, nilai rasio ekonomis ini menunjukkan bahwa instansi telah menjalankan prinsip ekonomi, yang merupakan salah satu aspek dalam konsep *Value for Money*.

$$\text{Tahun 2022} = \frac{16.514.547.719,00}{18.621.475.367,00} \times 100\%$$

$$= 88,69\%$$

Hasil sebesar 88,69% menunjukkan bahwa instansi telah menggunakan 88,69% dari anggaran yang dialokasikan. Dalam perspektif Akuntansi Sektor Publik, nilai rasio ekonomis ini menunjukkan bahwa instansi telah menjalankan prinsip ekonomi, yang merupakan salah satu aspek dalam konsep *Value for Money*.

$$\text{Tahun 2023} = \frac{14.974.680.204,00}{15.925.921.582} \times 100\%$$

$$= 94,02\%$$

Hasil sebesar 94,02% menunjukkan bahwa instansi telah menggunakan 94,02% dari anggaran yang dialokasikan. Dalam perspektif Akuntansi Sektor Publik, nilai rasio ekonomis ini

menunjukkan bahwa instansi telah menjalankan prinsip ekonomi, yang merupakan salah satu aspek dalam konsep *Value for Money*.

$$\text{Tahun 2024} = \frac{14.320.442.093,00}{15.673.409.467} \times 100\% \\ = 91,37\%$$

Hasil sebesar 91,37% menunjukkan bahwa instansi telah menggunakan 91,37% dari anggaran yang dialokasikan. Dalam perspektif Akuntansi Sektor Publik, nilai rasio ekonomis ini menunjukkan bahwa instansi telah menjalankan prinsip ekonomi, yang merupakan salah satu aspek dalam konsep *Value for Money*.

Tabel 4. 8
Rasio Ekonomis DPMD Jember Tahun 2021-2024

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Belanja	Rasio Ekonomis
2021	15.500.295.282,00	12.754.259.875,92	82,28%
2022	18.621.475.367,00	16.514.547.719,00	88,69%
2023	15.925.921.582	14.974.680.204,00	94,02%
2024	15.673.409.467	14.320.442.093,00	91,37%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Jember

b. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat **efisiensi** berkaitan dengan pencapaian *output* maksimal dengan *input* tertentu, atau penggunaan *input* minimum untuk mencapai *output* yang diinginkan.⁴⁵ Efisiensi diukur melalui perbandingan antara *output* dan *input* yang relevan, berdasarkan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

⁴⁵ Nabila Putri Rachmadi et al., "P-Issn: 2579-969x; e-Issn: 2622-7940 Determinan Kinerja Anggaran Berbasis Value for Money," *193 Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 7 No. 2 2023* 7 (2023): 188–96.

Jika hasilnya melebihi 100%, anggaran dianggap sangat efisien. Untuk hasil dalam rentang 90%-100%, anggaran dinilai efisien. Sementara itu, jika hasilnya berada antara 80%-90%, anggaran dianggap cukup efisien. Hasil dalam kisaran 60%-80% menunjukkan anggaran kurang efisien, sedangkan hasil di bawah 60% mengindikasikan anggaran tidak efisien.

Berikut **pengukuran** kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *Value For Money* pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021-2024 dari segi Efisiensi:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{realisasi anggaran belanja}}{\text{realisasi anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{21.949.577.176}{12.754.259.875,92} \times 100\% \\ &= 72,10\% \end{aligned}$$

Hasil sebesar 72,10% menunjukkan bahwa instansi telah menggunakan 72,10% dari realisasi anggaran pendapatan. Dalam perspektif Akuntansi Sektor Publik, nilai rasio efisiensi ini menunjukkan **bahwa** instansi telah berupaya mengelola anggaran secara efisien, yang merupakan salah satu aspek dalam konsep *Value for Money*.

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2022} &= \frac{16.514.547.719,00}{17.809.845.367} \times 100\% \\ &= 94,31\% \end{aligned}$$

Hasil sebesar 94,31% menunjukkan bahwa instansi telah menggunakan 94,31% dari realisasi anggaran pendapatan. Dalam perspektif Akuntansi Sektor Publik, nilai rasio efisiensi ini menunjukkan bahwa instansi telah berupaya mengelola anggaran

secara efisien, yang merupakan salah satu aspek dalam konsep *Value for Money*.

$$\text{Tahun 2023} = \frac{14.974.680.204,00}{16.234.831.257} \times 100\% \\ = 92,23\%$$

Hasil sebesar 92,23% menunjukkan bahwa instansi telah menggunakan 92,23% dari realisasi anggaran pendapatan. Dalam perspektif Akuntansi Sektor Publik, nilai rasio efisiensi ini menunjukkan bahwa instansi telah berupaya mengelola anggaran secara efisien, yang merupakan salah satu aspek dalam konsep *Value for Money*.

$$\text{Tahun 2024} = \frac{14.320.442.093,00}{15.673.409.467} \times 100\% \\ = 91,37\%$$

Hasil sebesar 91,37% menunjukkan bahwa instansi telah menggunakan 91,37% dari realisasi anggaran pendapatan. Dalam perspektif Akuntansi Sektor Publik, nilai rasio efisiensi ini menunjukkan bahwa instansi telah berupaya mengelola anggaran secara efisien, yang merupakan salah satu aspek dalam konsep *Value for Money*.

Tabel 4. 9
Rasio Efisiensi DPMD Jember Tahun 2021-2024

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja	Realisasi Anggaran Pendapatan	Rasio Efisiensi
2021	12.754.259.875,92	21.949.577.176	72,10%
2022	16.514.547.719,00	17.809.845.367	94,31%
2023	14.974.680.204,00	16.234.831.257	92,23%
2024	14.320.442.093,00	15.673.409.467	91,37%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Jember

c. Rasio Efektifitas

Pengukuran tingkat efektivitas berkaitan dengan seberapa efektif kinerja keuangan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.⁴⁶

Kegiatan yang **dilaksanakan** dianggap efektif apabila memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Semakin besar *output* terhadap pencapaian tujuan, semakin tinggi tingkat efektivitas kinerja organisasi.

Pengukuran efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. **Efektivitas** tidak menyatakan seberapa besar biaya yang dikerahkan guna mencapai tujuan organisasi. Efektivitas pula dapat diartikan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Apabila suatu organisasi berhasil atas pencapaian target organisasi tersebut, maka organisasi itu dikatakan telah berjalan dengan efektif.

Jika hasilnya **melebihi** 100%, anggaran dianggap sangat efektif. Untuk hasil dalam rentang 90%-100%, anggaran dinilai efektif. Sementara itu, jika hasilnya berada antara 80%-90%, anggaran dianggap cukup efektif. Hasil dalam kisaran 60%-80% menunjukkan anggaran kurang efektif, sedangkan hasil di bawah 60% mengindikasikan anggaran tidak efektif.

Berikut pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan konsep *Value For Money* pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember tahun 2021-2024 dari segi Efektifitas:

⁴⁶ Latifah Latifah et al., "Penerapan Sistem Kinerja Berbasis E-Kinerja Pada Pemerintahan Kota Bekasi," *Jurnal Administrasi Negara* 29, no. 1 (2023): 1–19, <https://doi.org/10.33509/jan.v29i1.1830>.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{realisasi anggaran pendapatan}}{\text{target anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{21.949.577.176}{25.494.775.671} \times 100\%$$

$$= 86,69\%$$

Hasil sebesar 86,69% menunjukkan bahwa instansi telah mencapai 86,69% dari target anggaran pendapatan. Dalam perspektif Akuntansi Sektor Publik, nilai rasio efektivitas ini menunjukkan bahwa instansi telah berupaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan guna mendukung keberlanjutan operasional.

$$\text{Tahun 2022} = \frac{17.809.845.367}{20.908.545.736} \times 100\%$$

$$= 85,18\%$$

Hasil sebesar 85,18% menunjukkan bahwa instansi telah mencapai 85,18% dari target anggaran pendapatan. Dalam perspektif Akuntansi Sektor Publik, nilai rasio efektivitas ini menunjukkan bahwa instansi telah berupaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan guna mendukung keberlanjutan operasional.

$$\text{Tahun 2023} = \frac{16.234.831.257}{18.432.138.752} \times 100\%$$

$$= 88,08\%$$

Hasil sebesar 88,08% menunjukkan bahwa instansi telah mencapai 88,08% dari target anggaran pendapatan. Dalam perspektif Akuntansi Sektor Publik, nilai rasio efektivitas ini menunjukkan bahwa instansi telah berupaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan guna mendukung keberlanjutan operasional.

$$\text{Tahun 2024} = \frac{15.673.409.467}{18.376.904.764} \times 100\%$$

$$= 85,29\%$$

Hasil sebesar 85,29% menunjukkan bahwa instansi telah mencapai 85,29% dari target anggaran pendapatan. Dalam perspektif Akuntansi Sektor Publik, nilai rasio efektivitas ini menunjukkan bahwa instansi telah berupaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan guna mendukung keberlanjutan operasional.

Tabel 4. 10
Rasio Efektivitas DPMD Jember Tahun 2021-2024

Tahun	Target Anggaran Pendapatan	Realisasi Anggaran Pendapatan	%
2021	25.494.775.671	21.949.577.176	86,69%
2022	20.908.545.736	17.809.845.367	85,18%
2023	18.432.138.752	16.234.831.257	88,08%
2024	18.376.904.764	15.673.409.467	85,29%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Jember

2. Dampak penerapan konsep *Value for Money* terhadap kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

a) Segi Ekonomis

1) Tahun 2021

Pada tahun 2021, rasio ekonomis dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mencapai 82,28, yang dikategorikan sebagai nilai cukup ekonomis berdasarkan kriteria dalam Tabel 3.4. Pencapaian ini menunjukkan bahwa instansi berupaya dalam mengelola anggaran, meski masih terdapat ruang

atas perbaikan, terutama dalam pengoptimalan sumber daya agar lebih ekonomis.

Hasil analisis tingkat ekonomis tahun 2021 menunjukkan meski telah berada dalam kategori cukup ekonomis, pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya perbaikan atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dalam analisis tersebut menjawab atas dampak kinerja keuangan instansi dengan ditujukannya bahwa salah satu faktor atas pengelolaan anggaran yang belum optimal merupakan kurangnya perencanaan anggaran atas meminimalisir dana anggaran. Oleh karena itu, beberapa hal dalam instansi mungkin tidak sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan atau menghadapi kendala dalam pelaksanaan karena alokasi anggaran.

Maka dari itu, diperlukan evaluasi terhadap realisasi anggaran dengan meningkatkan akurasi dalam proses perencanaan, serta menetapkan prioritas yang lebih jelas guna pengoptimalan sumber daya.

2) Tahun 2022

Pada tahun 2022, rasio ekonomis dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mencapai 88,69%, dikategorikan sebagai nilai cukup ekonomis berdasarkan kriteria dalam Tabel 3.4. Pencapaian ini menunjukkan adanya peningkatan

nilai ekonomis dari tahun sebelumnya, meski masih terdapat ruang perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran guna mencapai kategori ekonomis maupun sangat ekonomis di masa mendatang.

Hasil analisis tingkat ekonomis tahun 2022 menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi peningkatan, pencapaian tersebut masih berada dalam kategori cukup ekonomis. Hal ini mengindikasikan bahwa perlu adanya perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan instansi dalam pengelolaan anggaran belum cukup optimal.

Maka dari itu, diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap realisasi anggaran dengan meningkatkan proses perencanaan anggaran, serta meminimalisir anggaran guna pengoptimalan sumber daya. Optimalisasi dapat dilakukan dengan strategi yang berfokus pada efisiensi pengeluaran, seperti mengidentifikasi hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan serta melakukan penyesuaian alokasi sumber daya berdasarkan kegiatan instansi.

3) Tahun 2023

Pada tahun 2023, rasio ekonomis dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mencapai 94,02%, yang

dikategorikan sebagai nilai ekonomis berdasarkan kriteria dalam Tabel 3.4. Pencapaian ini menunjukkan bahwa instansi telah berhasil meningkatkan pada nilai ekonomis dalam pengelolaan anggaran dari tahun sebelumnya.

Hasil analisis tingkat ekonomis tahun 2023 menunjukkan pencapaian tersebut mencerminkan adanya perbaikan atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, yang berkontribusi pada peningkatan ke ekonomisan dalam penggunaan dana. Hal ini juga berdampak pada kinerja keuangan instansi dengan menunjukkan bahwa langkah-langkah pengoptimalan yang telah diterapkan mampu meningkatkan nilai ekonomis dalam pengelolaan anggaran. Namun demikian, upaya lebih lanjut masih diperlukan guna mempertahankan pencapaian ini.

Maka dari itu, diperlukan strategi yang berkelanjutan melalui peningkatan dalam proses perencanaan anggaran, pengawasan yang lebih ketat terhadap realisasi anggaran, serta penyusunan program yang lebih terarah guna mendukung optimalisasi penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan konsep *Value For Money*.

4) Tahun 2024

Pada tahun 2024, rasio ekonomis dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mencapai 91,37%, yang

dikategorikan sebagai nilai ekonomis berdasarkan kriteria dalam Tabel 3.4. Pencapaian ini menunjukkan bahwa instansi telah berhasil meningkatkan nilai ekonomis dalam pengelolaan anggaran.

Hasil analisis tingkat ekonomis tahun 2024 menunjukkan pencapaian tersebut mencerminkan adanya perbaikan atas perencanaan serta pelaksanaan anggaran, yang berkontribusi pada peningkatan ke ekonomisan dalam penggunaan dana. Hal ini juga berdampak pada kinerja keuangan instansi dengan menunjukkan bahwa langkah-langkah pengoptimalan yang telah diterapkan mampu meningkatkan nilai ekonomis dalam pengelolaan anggaran. Namun demikian, upaya lebih lanjut masih diperlukan guna mempertahankan pencapaian ini.

Maka dari itu, diperlukan strategi yang berkelanjutan melalui peningkatan dalam proses perencanaan anggaran, pengawasan yang lebih ketat terhadap realisasi anggaran, serta penyusunan program yang lebih terarah guna mendukung optimalisasi penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif sesuai dengan konsep *Value For Money*.

b) Segi Efisiensi

1) Tahun 2021

Pada tahun 2021, rasio efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mencapai 72,10%, yang dikategorikan sebagai nilai kurang efisien berdasarkan kriteria dalam Tabel 3.4 pada analisis data. Pencapaian ini mencerminkan bahwa instansi berhasil dalam mengelola anggaran secara efisien, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan konsep *Value For Money*.

Hasil analisis tingkat efisiensi tahun 2021 menunjukkan bahwa instansi berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran, dengan efisiensi yang hampir mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember telah berjalan dengan baik, tanpa pemborosan yang signifikan, serta mendukung atas pencapaian tujuan serta program yang telah direncanakan. Meski pencapaian ini baik, upaya lebih lanjut tetap diperlukan guna menjaga nilai efisiensi yang telah dicapai serta mencari peluang untuk peningkatan di masa mendatang.

Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran, serta menerapkan strategi, seperti penerapan teknologi dan pengelolaan sumber daya yang lebih strategis, guna memastikan bahwa efisiensi tetap terjaga. Peningkatan produktivitas dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran juga dapat menjadi langkah penting guna

menjaga kinerja keuangan yang efisien dan mendukung pencapaian.

2) Tahun 2022

Pada tahun 2022, rasio efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mencapai 94,31%, yang dikategorikan sebagai nilai efisien berdasarkan kriteria dalam Tabel 3.5. Pencapaian ini menunjukkan bahwa instansi telah berhasil dalam mengelola anggaran secara efisien.

Hasil analisis tingkat efisiensi tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat efisiensi yang sangat tinggi ini mencerminkan optimalisasi penggunaan sumber daya yang hampir maksimal.

Dengan rasio efisiensi sebesar 94,31%, tanpa adanya pemborosan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mampu memanfaatkan anggaran dengan efisien, sehingga mendukung keberhasilan program serta kinerja pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa.

Tingkat efisiensi yang hampir sempurna ini juga memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan instansi, dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Untuk mempertahankan pencapaian ini, diperlukan pengawasan yang berkelanjutan dan

strategi dalam pengelolaan anggaran agar tetap efisien, serta untuk memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

3) Tahun 2023

Pada tahun 2023, rasio efisiensi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mencapai 92,23%, yang dikategorikan sebagai nilai efisien berdasarkan kriteria dalam Tabel 3.5 pada analisis data.

Hasil analisis tingkat efisiensi tahun 2023 menunjukkan bahwa meskipun rasio efisiensi sedikit menurun, pengelolaan anggaran masih tetap optimal dan berada dalam kategori efisien. Angka 99,72% ini mencerminkan bahwa penggunaan *input* yang ada telah dimaksimalkan guna mencapai *output* yang diinginkan, dengan sedikit atau tanpa pemborosan. Konsistensi dalam mempertahankan tingkat efisiensi ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember berhasil menjaga pengelolaan anggaran secara efisien dalam mendukung pencapaian.

Meski terdapat penurunan dibanding tahun sebelumnya, pencapaian ini tetap menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik dan mendukung keberlanjutan pembangunan desa. Oleh karena itu, upaya untuk terus mempertahankan dan meningkatkan efisiensi anggaran melalui pengawasan yang lebih serta strategi pengelolaan

dana yang lebih efisien sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program yang lebih optimal.

4) Tahun 2024

Pada tahun 2024, rasio ekonomis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mencapai 91,37%, yang dikategorikan sebagai nilai ekonomis berdasarkan kriteria dalam Tabel 3.5 pada analisis data. Pencapaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah berada pada kategori ekonomis, dengan penggunaan sumber daya yang efisien serta pemborosan yang minimal.

Hasil analisis tingkat ekonomis tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam nilai efisien perencanaan dan pelaksanaan anggaran dibanding dengan tahun sebelumnya. Rasio 91,37% ini mencerminkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember berhasil mengoptimalkan penggunaan anggaran secara maksimal, dengan pengelolaan yang lebih baik dan terarah. Meski demikian, untuk mempertahankan nilai efisiensi, diperlukan upaya berkelanjutan dalam evaluasi pengelolaan anggaran serta pengawasan atas pengeluaran dana.

Dengan terus melakukan evaluasi dan pengawasan yang efektif, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dapat memastikan bahwa pengelolaan anggaran tetap

berada dalam kategori efisien, dimana mendukung dalam pencapaian tujuan instansi yang lebih optimal.

c) Segi Efektifitas

1) Tahun 2021

Pada tahun 2021, rasio efektifitas dalam realisasi pendapatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mencapai 86,69%, yang dikategorikan sebagai cukup efektif berdasarkan kriteria dalam Tabel 3.6 pada analisis data. Pencapaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar target telah berhasil direalisasikan.

Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan sudah mendekati target, namun masih terdapat ruang guna perbaikan dalam meningkatkan keefektifan. Nilai tersebut mencerminkan bahwa upaya yang dilakukan sudah signifikan, meski masih dipengaruhi oleh beberapa kendala, diantaranya seperti kurang optimalnya alokasi sumber daya.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi yang mendalam atas faktor yang mempengaruhi, serta perbaikan strategi. Optimalisasi pengelolaan sumber daya menjadi langkah penting untuk meningkatkan nilai efektivitas di masa mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara lebih maksimal.

2) Tahun 2022

Pada tahun 2022, rasio efektifitas dalam realisasi pendapatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mencapai 85,18%, yang dikategorikan sebagai cukup efektif berdasarkan kriteria dalam Tabel 3.6 pada analisis data. Meski belum mencapai angka ideal sebesar 90% atau lebih, nilai ini mencerminkan bahwa sebagian besar target telah berhasil direalisasikan dengan langkah perbaikan dalam pengelolaan keuangan.

Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan dalam pelaksanaan realisasi anggaran yang mendorong peningkatan rasio efektivitas. Beberapa kendala, seperti alokasi sumber daya yang belum sepenuhnya optimal atau hambatan dalam pelaksanaan realisasi anggaran, masih menjadi faktor yang perlu diatasi.

Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap faktor-faktor penghambat, serta penyusunan strategi yang lebih terukur dan terarah. Optimalisasi pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program menjadi langkah penting untuk mencapai nilai efektivitas yang lebih tinggi pada tahun mendatang, sehingga tujuan dapat dicapai secara lebih maksimal.

3) Tahun 2023

Pada tahun 2023, rasio efektifitas dalam realisasi pendapatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mencapai 88,08%, yang dikategorikan sebagai efektif berdasarkan kriteria dalam Tabel 3.6 pada analisis data.

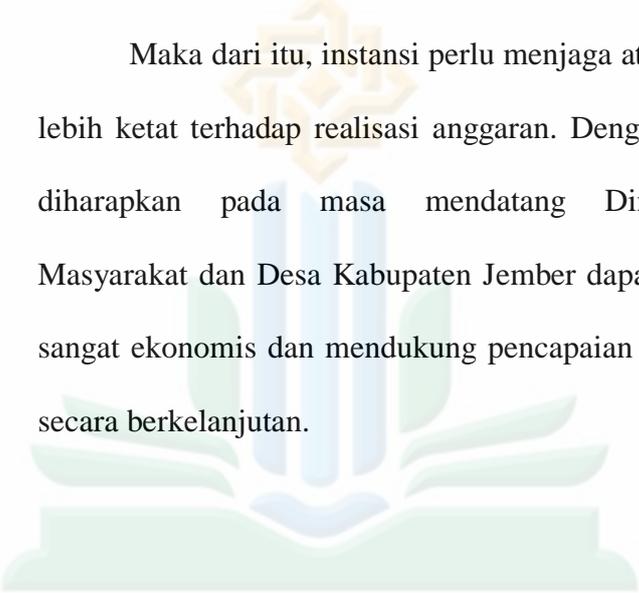
Peningkatan ini menjadi cerminan adanya perbaikan dalam pengelolaan kinerja keuangan, implementasi program, serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang lebih baik. Hasil ini juga menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diterapkan dalam pengoptimalan kinerja keuangan telah memberikan hasil dan mendukung pencapaian target yang lebih optimal. Dengan hasil ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember diharapkan dapat terus mempertahankan strategi yang sudah berjalan, sekaligus mengembangkan inovasi baru untuk lebih meningkatkan efektivitas pada tahun mendatang. Optimalisasi sumber daya akan menjadi langkah penting untuk mencapai hasil yang lebih maksimal.

4) Tahun 2024

Pada tahun 2024, rasio efektifitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember mencapai 85,29%, yang dikategorikan sebagai ekonomis berdasarkan kriteria dalam Tabel 3.6 pada analisis data. Nilai persentase ini mencerminkan bahwa

pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan efektif. Yakni dengan tingkat pemborosan yang minim, sehingga sebagian besar anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Maka dari itu, instansi perlu menjaga atas pengawasan yang lebih ketat terhadap realisasi anggaran. Dengan langkah tersebut, diharapkan pada masa mendatang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dapat mencapai kategori sangat ekonomis dan mendukung pencapaian target pembangunan secara berkelanjutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai, dapat Implementasi Konsep *Value for Money* dalam Penilaian Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember disimpulkan bahwa kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember telah menunjukkan hasil yang baik ketika diukur berdasarkan tiga elemen utama yakni *Value for Money* dalam segi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

1. Kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember jika diukur dengan konsep *Value For Money* :
 - a. Pada aspek ekonomi, pengelolaan anggaran dilakukan secara ekonomis dengan meminimalkan biaya yang dikeluarkan tanpa mengurangi kualitas *input* yang dibutuhkan. Hal ini terlihat dari realisasi belanja yang sesuai dengan anggaran yang direncanakan, serta upaya pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan prinsip penghematan sesuai dengan indikator *Value For Money*.
 - b. Pada aspek efisiensi, kinerja Dinas dapat dikategorikan efisien. Rasio ini mencerminkan bahwa hampir seluruh sumber daya yang tersedia telah digunakan secara optimal untuk menghasilkan *output* yang diharapkan tanpa adanya pemborosan yang signifikan.
 - c. Pada aspek efektivitas, pencapaian tujuan program dan kegiatan instansi menunjukkan hasil yang positif, di mana realisasi program pemberdayaan masyarakat dan desa berhasil mendukung tujuan

strategis pembangunan daerah, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan pemberdayaan ekonomi.

2. Dampak penerapan konsep *Value for Money* terhadap kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember yakni sangat signifikan. Implementasi konsep ini tidak hanya mendorong optimalisasi penggunaan sumber daya, namun juga meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pengelolaan keuangan. Hal ini pada akhirnya memperkuat kepercayaan masyarakat serta pejabat instansi selaku pemangku kepentingan terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, hal ini sekaligus mendukung tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan mengutamakan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, Instansi mampu memberikan nilai tambah dalam setiap pelaksanaan program, sehingga dapat menjadi rujukan dalam pengelolaan keuangan yang berbasis hasil (*outcome-oriented*), dimana implementasi konsep *Value for Money* terbukti memberikan dampak positif pada kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, baik dalam pengelolaan anggaran maupun dalam pencapaian tujuan program pembangunan desa. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ini, diperlukan pengawasan yang berkelanjutan, inovasi dalam pengelolaan sumber daya, serta kolaborasi dengan berbagai pihak demi memastikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

G. Saran-Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dijabarkan oleh peneliti, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember cukup baik dalam pengelolaan kinerja keuangan. Ada beberapa saran yang bisa menjadi pertimbangan bagi instansi, diantaranya yaitu:

1. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember agar Memperkuat Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel. Hal ini berguna dalam pengelolaan keuangan. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan laporan keuangan yang terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.
2. Kedua yakni untuk optimalisasi Implementasi Prinsip *Value for Money* Instansi perlu memastikan bahwa prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas diterapkan secara merata di semua program dan kegiatan. Hal ini dapat dilakukan melalui perencanaan yang lebih terintegrasi, monitoring yang intensif, dan evaluasi berbasis hasil (*outcome*).
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, misalnya dengan mengkaji implementasi konsep *Value for Money* pada instansi atau sektor lain, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait penerapan konsep tersebut.
4. Bagi akademisi, penelitian ini untuk dijadikan salah satu referensi dan informasi yang berkaitan dengan strategi akuntansi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkalah, Cynthia. "PENERAPAN KONSEP VALUE FOR MONEY DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH" 19, no. 5 (2016): 1–23.
- Anggrahiny, Kurnia, Ma'ruf Sya'ban, and Rieska Maharani. "Analisis Penilaian Kinerja Berdasarkan Konsep Value For Money Untuk Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kota Surabaya." *Sustainable* 1, no. 2 (2021): 286. <https://doi.org/10.30651/stb.v1i2.10843>.
- Dian Mawardi, Kukuh Harianto, and Mawar Ratih Kusumawardani. "Analisis Kinerja Keuangan Pada Kegiatan Bappeda Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017-2021 Menggunakan Konsep Value for Money." *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 4 (2022): 72–80. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v1i4.611>.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember. "KSOTK DPMD 2023.Pdf," n.d.
- Ekonomi, Media, Andrian Natanail Silaban, Tika Triana Lismono, and Erika Silaen. "Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik Menggunakan Metode Value For Money Pada Pemprov DKI Jakarta Media Ekonomi Dan Bisnis" 1 (2024): 1–6.
- Fauziah, Fresila Hana, Program Studi Akuntansi, and Akie Rusaktiva Rustam. "Reaksi 01.10.2023" 2, no. 4 (2023): 907–21.
- G.Yulia Novita Sari, Satria Tri Nanda, Ika Berty, Raisya Zenita. "Analisis Value for Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 5, no. 1 (2022): 56–65.
- Haryanto dkk. *Akutansi Sektor Publik. Perpustakaan Nasional*, 2017.
- <https://quran.nu.or.id/>. "Surat Al-An'am Ayat 15: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," n.d. <https://quran.nu.or.id/al-an%27am/15>.
- Irfansyah, Ahmad, and Jumania Septariani. "Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Melalui Pendekatan Value for Money." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah* 5, no. 1 (2022): 17–36. <https://doi.org/10.51877/jiar.v5i1.212>.
- Karina, Luthfia Ayu, and Wahyu Ramadhani. "Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value for Money Pada Blud Puskesmas Murung

Pudak Kabupaten Tabalong.” *Value* 2, no. 2 (2022): 71–82.
<https://doi.org/10.36490/value.v2i2.214>.

“Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Konsep Value for Money Pada Blud Puskesmas Murung Pudak Kabupaten Tabalong.” *Value* 2, no. 2 (2022): 71–82. <https://doi.org/10.36490/value.v2i2.214>.

Kemenkeu. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia.” *Kemenkeu.Go.Id*, 2013.

Latifah, Latifah, Fatmawati Fatmawati, Ilham Ilham, and Abdul Gafur. “Penerapan Sistem Kinerja Berbasis E-Kinerja Pada Pemerintahan Kota Bekasi.” *Jurnal Administrasi Negara* 29, no. 1 (2023): 1–19. <https://doi.org/10.33509/jan.v29i1.1830>.

Lintang, Franclin Alexandria, Treesje Runtu, Dhullo Afandi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, and Universitas Sam Ratulangi. “Evaluasi Pengukuran Kinerja Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money The Bureau Of North Sulawesi Regional Secretariat Organizations Based On The Concept Of Value For Money.” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi ...* 6, no. 2 (2023): 1401–16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/46048%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/download/46048/41298>.

Maharani, Yunita, and Rafika Sari. “Konsep Value For Money Untuk Pengukuran Kinerja Pada Kantor Imigrasi Pangkalpinang.” *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan* 2, no. 1 (2021): 97. <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i1.1919>.

Maryanti, C Susi, and Agus Munandar. “Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019.” *Jurnal Ilmiah MEA* 5, no. 3 (2021): 2888–89.

Masruroh, Nikmatul, and Suprianik Suprianik. “Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Desa Melalui Pendidikan Ekonomi Kreatif.” *Global Education Journal* 1, no. 2 (2023): 73–85. <https://doi.org/10.59525/gej.v1i2.136>.

Matulatuwa, Antagracea, Julie Th Pelamonia, Wa Asrida, Jurusan Akuntansi, and Politeknik Negeri Ambon. “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.” *Journal of Applied Accounting (Jaa)* 3, no. 1 (2024). <https://journal.isas.or.id/index.php/JAA>.

Melta Idrika, Novi Mubyarto, and Efni Anita. “Analisis Pengukuran Value for

- Money Pada Apbdes Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Pemerintahan Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo.” *Transformasi: Journal of Economics and Business Management* 2, no. 1 (2023): 53–66. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v2i1.363>.
- Moch Chotib. “KINERJA DAN AKUNTABILITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER” 7, no. 2 (2017): 2588–93.
- Permata Sukma, Indah, and Asep Muslihat. “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Dengan Menggunakan Metode Value For Money.” *Akuntansi* 45 4, no. 2 (2023): 374–83. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1279>.
- Pratama, Versiandika Yudha, Syamsuddin, and Farah Difa. “Analisis Pengukuran Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.” *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 1, no. 2 (2022): 149–55. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.411>.
- Pratiwi, Ana, and Fitriatul Muqmiroh. “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Keputusan Investasi Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)* 2, no. 2 (2022): 114–25. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1465>.
- Publik, Administrasi Keuangan, Fakultas Ilmu, and Ilmu Politik. “Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Pendekatan Value For Money Pada PT Perkebunan Nusantara VIII” 7 (n.d.).
- Putri, Erina Setiana, and Nur Ika Mauliyah. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.” *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis* 2, no. 2 (2022): 108–17. <https://doi.org/10.25047/asersi.v2i2.3603>.
- Rachmadi, Nabila Putri, Anggeraini Oktarida, Kiagus Zainal Arifin, Akuntansi Sektor Publik, and Politeknik Negeri Sriwijaya. “P-Issn : 2579-969x ; e-Issn : 2622-7940 Determinan Kinerja Anggaran Berbasis Value for Money.” *193 Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 7 No. 2 2023* 7 (2023): 188–96.
- Rhomadiningsih, Defi. “Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK) Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Kota Blitar” 6, no. 3 (2024): 288–303.
- Sanger, Gerald William, Hendrik Manossoh, and Claudia W. M. Korompis. “Evaluasi Kinerja Keuangan Dengan Metode Value For Money Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado.” *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)* 6, no. 2 (2023): 1193–1202.

Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.

Surah Asy-Syu'ara' - 181-183 - Quran.

Sutama, I Nyoman, Fani Fatona, and Nining Sudiarti. "ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN KONSEP VALUE FOR MONEY (Studi Di Kantor Camat Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)." *Samalewa: Jurnal Riset & Kajian Manajemen* 2, no. 2 (2022): 193–200. <https://doi.org/10.58406/samalewa.v2i2.1020>.

Wakhid Yuliyanto, Sri Wahyuningsih, Rizki Kurniasih, and Ari Waluyo. "Pengukuran Kinerja Melalui Pendekatan 'Value For Money' Pada Pelaksanaan Anggaran Dinas 'X' Di Sektor Publik." *Jurnal E-Bis* 7, no. 1 (2023): 233–45. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v7i1.1183>.

Wirantari, I Putu Ekayana I Dewa Ayu Putri. "Evaluasi Pengukuran Kinerja Anggaran Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value For Money." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 38–50. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/view/46048%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lppmekosobudkum/article/download/46048/41298>.

Yulitiawati, Y, and R Rusmidarti. "Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Di Kabupaten OKU." *Jetap*, 2021, 91–109. <http://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/view/966%0Ahttps://journal.unbara.ac.id/index.php/etap/article/download/966/640>.

LAMPIRAN 1 MATRIKS PENELITIAN

1	2	3	4	5	6
Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Konsep Value For Money Dalam Penilaian Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember	Indikator Konsep Value For Money - Ekonomi - Efisiensi - Efektifitas	Ekonomi - Realisasi anggaran belanja terhadap anggaran - Target anggaran belanja dan kesesuaian anggaran Efisiensi - Realisasi anggaran belanja terhadap anggaran - Anggaran pendapatan yang telah ditetapkan Efektifitas	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember serta Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember	Metode Penelitian: Kualitatif Deskriptif Objek Penelitian: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Teknis Pengumpulan Data: Menggunakan Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran	1. Bagaimana kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember jika diukur berdasarkan tiga elemen <i>Value for Money</i> , yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas ? 2. Apa dampak penerapan konsep <i>Value for Money</i> terhadap kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

1	2	3	4	5	6
Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
		<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran pendapatan yang telah ditetapkan - Anggaran dalam mendukung tujuan program 		<p>Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) tahun 2021 sampai dengan 2024.</p> <p>Analisis Data : Perhitungan Dengan Indikator</p> <p>Konsep Value For Money:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rasio Ekonomi - Rasio Efisiensi - Rasio Efektifitas 	Desa Kabupaten Jember ?

LAMPIRAN 2 DOKUMENTASI PELAKSANAAN ANGGARAN

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**





KAB. JEMBER

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2021

**URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.13.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Pengguna Anggaran :

- a. **Nama** : ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
b. **NIP** : 197703251996031004
c. **Jabatan** : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

**Disahkan oleh,
PPKD**

**Jember, tanggal 30 April 2021
Pengguna Anggaran**

TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.
NIP: 197703251996031004

ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
NIP: 197107041998032006

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2021

Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.1..00/001/2021

Organisasi : 2.13.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	25.494.775.671
	Jumlah Pendapatan	25.494.775.671
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	21.813.443.676
5.1.01	Belanja Pegawai	4.945.164.320
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.868.279.356
5.2	BELANJA MODAL	136.133.500
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	136.133.500
	Jumlah Belanja	21.949.577.176
	Total Surplus/(Defisit)	0
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Neto	0

Rencana Realisasi Penerimaan dan Penarikan Dana per Bulan

Bulan	Rencana Realisasi Penerimaan (Rp)	Rencana Penarikan Dana (Rp)
Januari	0	0
Februari	0	0
Maret	0	2.250.865.727
April	0	4.741.583.641
Mei	0	1.604.484.581
Juni	0	1.868.861.581

Bulan	Rencana Realisasi Penerimaan (Rp)	Rencana Penarikan Dana (Rp)
Juli	0	3.495.440.891
Agustus	0	2.056.770.081
September	0	1.253.545.081
Oktober	0	1.847.537.531
November	0	2.571.582.562
Desember	0	258.905.500
Jumlah	21.949.577.176	21.949.577.176

Jember, tanggal 30 April 2021
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

ADI WIJAYA, S.STP
NIP: 197703251996031004

Mengesahkan,
PPKD

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.
NIP: 197107041998032006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah



KAB. JEMBER

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2022

**URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.13.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Pengguna Anggaran :

- a. **Nama** : ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
b. **NIP** : 197703251996031004
c. **Jabatan** : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

**Disahkan oleh,
PPKD**

**Jember, tanggal 24 Oktober 2022
Pengguna Anggaran**

TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.
NIP: 197703251996031004

ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
NIP: 197107041998032006

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.1..00/001/2022

Organisasi : 2.13.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	20.908.545.736
	Jumlah Pendapatan	20.908.545.736
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	17.798.675.367
5.1.01	Belanja Pegawai	3.974.861.531
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.823.813.836
5.2	BELANJA MODAL	11.170.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.170.000
	Jumlah Belanja	17.809.845.367
	Total Surplus/(Defisit)	0
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Neto	0

Rencana Realisasi Penerimaan dan Penarikan Dana per Bulan

Bulan	Rencana Realisasi Penerimaan (Rp)	Rencana Penarikan Dana (Rp)
Januari	0	2.375.779.643
Februari	0	1.975.775.703
Maret	0	1.509.051.234
April	0	1.321.992.474
Mei	0	1.225.076.333
Juni	0	814.005.386

Bulan	Rencana Realisasi Penerimaan (Rp)	Rencana Penarikan Dana (Rp)
Juli	0	954.649.170
Agustus	0	659.866.050
September	0	676.306.050
Oktober	0	2.626.085.147
November	0	2.455.265.075
Desember	0	1.215.993.102
Jumlah	17.809.845.367	17.809.845.367

Jember, tanggal 24 Oktober 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

ADI WIJAYA, S.STP
NIP: 197703251996031004

Mengesahkan,
PPKD

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.
NIP: 197107041998032006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah



KAB. JEMBER

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2023

**URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.13.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Pengguna Anggaran :

- a. **Nama** : ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
b. **NIP** : 197703251996031004
c. **Jabatan** : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

**Disahkan oleh,
PPKD**

**Jember, tanggal 2 Januari 2023
Pengguna Anggaran**

TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.
NIP: 197703251996031004

ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
NIP: 197107041998032006

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.1..00/001/2023

Organisasi : 2.13.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	18.432.138.752
	Jumlah Pendapatan	18.432.138.752
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	15.926.490.057
5.1.01	Belanja Pegawai	3.992.681.161
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.356.833.896
5.1.05	Belanja Hibah	576.975.000
5.2	BELANJA MODAL	308.341.200
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	308.341.200
	Jumlah Belanja	16.234.831.257
	Total Surplus/(Defisit)	0
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Neto	0

Rencana Realisasi Penerimaan dan Penarikan Dana per Bulan

Bulan	Rencana Realisasi Penerimaan (Rp)	Rencana Penarikan Dana (Rp)
Januari	0	1.575.577.285
Februari	0	2.015.781.728
Maret	0	1.763.506.710
April	0	1.675.431.710
Mei	0	1.384.269.028

Bulan	Rencana Realisasi Penerimaan (Rp)	Rencana Penarikan Dana (Rp)
Juni	0	1.768.900.128
Juli	0	1.577.025.928
Agustus	0	1.205.721.128
September	0	973.249.228
Oktober	0	1.134.403.744
November	0	686.663.720
Desember	0	474.300.920
Jumlah	16.234.831.257	16.234.831.257

Jember, tanggal 02 Januari 2023

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

ADI WIJAYA, S.STP
NIP: 197703251996031004

Mengesahkan,
PPKD

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.
NIP: 197107041998032006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KAB. JEMBER

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA-SKPD)**

TAHUN ANGGARAN 2024

**URUSAN PEMERINTAHAN : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ORGANISASI : 2.13.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Pengguna Anggaran :

- a. **Nama** : ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
b. **NIP** : 197703251996031004
c. **Jabatan** : KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA

Kode	Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD	Ringkasan Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD	Ringkasan Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

**Disahkan oleh,
PPKD**

**Jember, tanggal 2 Januari 2024
Pengguna Anggaran**

TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.
NIP: 197703251996031004

ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
NIP: 197107041998032006

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2024

Nomor DPA : DPA/A.1/2.13.0.00.0.00.1..00/001/2024

Organisasi : 2.13.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH	18.376.904.764
	Jumlah Pendapatan	18.376.904.764
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	15.620.422.067
5.1.01	Belanja Pegawai	4.392.327.670
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.228.094.397
5.2	BELANJA MODAL	52.987.400
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.987.400
	Jumlah Belanja	15.673.409.467
	Total Surplus/(Defisit)	0
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0
	Pembiayaan Neto	0

Rencana Realisasi Penerimaan dan Penarikan Dana per Bulan

Bulan	Rencana Realisasi Penerimaan (Rp)	Rencana Penarikan Dana (Rp)
Januari	0	1.038.836.285
Februari	0	2.363.530.508
Maret	0	1.030.085.612
April	0	1.636.908.651
Mei	0	975.917.012
Juni	0	792.210.852

Bulan	Rencana Realisasi Penerimaan (Rp)	Rencana Penarikan Dana (Rp)
Juli	0	2.902.230.256
Agustus	0	1.065.517.012
September	0	984.447.012
Oktober	0	1.008.512.012
November	0	948.978.012
Desember	0	926.236.241
Jumlah	15.673.409.467	15.673.409.467

Jember, tanggal 02 Januari 2024
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

ADI WIJAYA, S.STP
NIP: 197703251996031004

Mengesahkan,
PPKD

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.
NIP: 197107041998032006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TITA FAJAR ARIYATININGSIH, SH., MM.
NIP: 197107041998032006

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

LAMPIRAN 3 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5	BELANJA DAERAH	15.500.295.282,00	0,00	12.754.259.875,92	12.754.259.875,92	(2.746.035.406,08)
5.1	BELANJA OPERASI	15.315.861.982,00	0,00	12.573.959.875,92	12.573.959.875,92	(2.741.902.106,08)
5.1.1	Belanja Pegawai	4.886.034.320,00	0,00	3.131.421.008,92	3.131.421.008,92	(1.754.613.311,08)
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.383.264.320,00	0,00	1.395.117.437,00	1.395.117.437,00	(988.146.883,00)
5.1.1.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.871.530.712,00	0,00	1.139.915.198,00	1.139.915.198,00	(731.615.514,00)
5.1.1.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.871.530.712,00	0,00	1.139.915.198,00	1.139.915.198,00	(731.615.514,00)
5.1.1.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	137.632.584,00	0,00	104.409.304,00	104.409.304,00	(33.223.280,00)
5.1.1.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	137.632.584,00	0,00	104.409.304,00	104.409.304,00	(33.223.280,00)
5.1.1.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	205.225.500,00	0,00	47.199.650,00	47.199.650,00	(158.025.850,00)
5.1.1.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	205.225.500,00	0,00	47.199.650,00	47.199.650,00	(158.025.850,00)
5.1.1.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	60.888.036,00	0,00	43.730.000,00	43.730.000,00	(17.158.036,00)
5.1.1.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	60.888.036,00	0,00	43.730.000,00	43.730.000,00	(17.158.036,00)
5.1.1.01.06	Belanja Tunjangan Biasa ASN	92.894.172,00	0,00	59.239.560,00	59.239.560,00	(33.654.612,00)
5.1.1.01.06.0001	Belanja Tunjangan Biasa PNS	92.894.172,00	0,00	59.239.560,00	59.239.560,00	(33.654.612,00)
5.1.1.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	15.060.732,00	0,00	608.785,00	608.785,00	(14.451.947,00)
5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	15.060.732,00	0,00	608.785,00	608.785,00	(14.451.947,00)
5.1.1.01.08	Belanja Pembuktian Gaji ASN	32.584,00	0,00	14.940,00	14.940,00	(17.644,00)
5.1.1.01.08.0001	Belanja Pembuktian Gaji PNS	32.584,00	0,00	14.940,00	14.940,00	(17.644,00)
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.275.920.000,00	0,00	1.535.883.571,92	1.535.883.571,92	(740.036.428,08)
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	910.368.000,00	0,00	611.075.750,00	611.075.750,00	(299.292.250,00)
5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	910.368.000,00	0,00	611.075.750,00	611.075.750,00	(299.292.250,00)
5.1.1.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	1.365.552.000,00	0,00	924.807.821,92	924.807.821,92	(440.744.178,08)
5.1.1.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	1.365.552.000,00	0,00	924.807.821,92	924.807.821,92	(440.744.178,08)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 1 dari 4

Page 4 of 5

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.1.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	226.850.000,00	0,00	200.420.000,00	200.420.000,00	(26.430.000,00)
5.1.1.03.07	Belanja Honorarium	226.850.000,00	0,00	200.420.000,00	200.420.000,00	(26.430.000,00)
5.1.1.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelolaan Keuangan	220.730.000,00	0,00	194.300.000,00	194.300.000,00	(26.430.000,00)
5.1.1.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengabdian Barang/Jasa	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	6.120.000,00	0,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	9.712.114.662,00	0,00	8.248.258.667,00	8.248.258.667,00	(987.288.795,00)
5.1.2.01	Belanja Barang	1.502.164.850,00	0,00	1.266.596.468,00	1.266.596.468,00	(235.568.382,00)
5.1.2.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.502.164.850,00	0,00	1.266.596.468,00	1.266.596.468,00	(235.568.382,00)
5.1.2.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	115.289.750,00	0,00	90.734.943,00	90.734.943,00	(24.554.807,00)
5.1.2.01.01.0010	Belanja Bahan-Bahan Tabung Gas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	32.774.000,00	0,00	25.387.125,00	25.387.125,00	(7.386.875,00)
5.1.2.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12.502.000,00	0,00	8.513.050,00	8.513.050,00	(3.988.950,00)
5.1.2.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	107.023.400,00	0,00	95.074.500,00	95.074.500,00	(11.948.900,00)
5.1.2.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	24.731.800,00	0,00	22.650.000,00	22.650.000,00	(2.081.800,00)
5.1.2.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	236.777.400,00	0,00	209.929.500,00	209.929.500,00	(26.847.900,00)
5.1.2.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	18.636.000,00	0,00	11.380.000,00	11.380.000,00	(7.256.000,00)
5.1.2.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	10.199.000,00	0,00	8.715.000,00	8.715.000,00	(1.484.000,00)
5.1.2.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	17.845.000,00	0,00	16.642.300,00	16.642.300,00	(1.202.700,00)
5.1.2.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	7.143.000,00	0,00	7.143.000,00	7.143.000,00	0,00
5.1.2.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Peralengkapan Dinas	3.304.500,00	0,00	804.000,00	804.000,00	(2.500.500,00)
5.1.2.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Peralengkapan Perdukungan Olahraga	35.755.500,00	0,00	32.213.000,00	32.213.000,00	(3.542.500,00)
5.1.2.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	132.444.500,00	0,00	84.260.000,00	84.260.000,00	(48.184.500,00)
5.1.2.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	70.484.000,00	0,00	52.774.500,00	52.774.500,00	(17.709.500,00)
5.1.2.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	52.425.000,00	0,00	46.227.550,00	46.227.550,00	(6.197.450,00)
5.1.2.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	624.566.000,00	0,00	553.884.000,00	553.884.000,00	(70.682.000,00)
5.1.2.01.01.0066	Belanja Pakain Dinas Upacara (PDU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.01.01.0075	Belanja Pakain Batik Tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02	Belanja Jasa	6.764.258.812,00	0,00	6.268.136.191,00	6.268.136.191,00	(496.122.621,00)
5.1.2.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.619.473.520,00	0,00	3.144.583.125,00	3.144.583.125,00	(474.890.395,00)
5.1.2.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	179.700.000,00	0,00	171.100.000,00	171.100.000,00	(8.600.000,00)
5.1.2.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	1.996.500.000,00	0,00	1.748.510.000,00	1.748.510.000,00	(247.990.000,00)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Halaman 2 dari 4

Page 4 of 5

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	3.240.000,00	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00	(1.080.000,00)
5.1.2.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	624.950.000,00	0,00	590.310.000,00	590.310.000,00	(34.640.000,00)
5.1.2.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	122.950.000,00	0,00	108.950.000,00	108.950.000,00	(14.000.000,00)
5.1.2.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	65.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	(50.000.000,00)
5.1.2.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	71.850.000,00	0,00	71.850.000,00	71.850.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0046	Belanja Jasa Komersial Aplikasi/Sistem Informasi	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.1.2.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	157.000.000,00	0,00	76.020.000,00	76.020.000,00	(80.980.000,00)
5.1.2.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	2.400.000,00	0,00	315.050,00	315.050,00	(2.084.950,00)
5.1.2.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	600.000,00	0,00	422.500,00	422.500,00	(177.500,00)
5.1.2.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	55.973.520,00	0,00	49.220.675,00	49.220.675,00	(6.752.845,00)
5.1.2.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV Berlangganan	1.200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	(600.000,00)
5.1.2.02.01.0065	Belanja Perambahan Daya	20.000.000,00	0,00	14.168.400,00	14.168.400,00	(5.831.600,00)
5.1.2.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bsa, dan Perizinan	9.850.000,00	0,00	1.897.500,00	1.897.500,00	(7.952.500,00)
5.1.2.02.01.0071	Belanja Lembar	227.260.000,00	0,00	213.059.000,00	213.059.000,00	(14.201.000,00)
5.1.2.02.02	Belanja Luran Jaminan/Asuransi	3.144.785.292,00	0,00	3.123.553.066,00	3.123.553.066,00	(21.232.226,00)
5.1.2.02.02.0001	Belanja Luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.876.467.792,00	0,00	1.873.273.826,00	1.873.273.826,00	(3.193.966,00)
5.1.2.02.02.0006	Belanja Luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.268.317.500,00	0,00	1.250.279.240,00	1.250.279.240,00	(18.038.260,00)
5.1.2.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03	Belanja Pemeliharaan	106.583.000,00	0,00	94.464.808,00	94.464.808,00	(12.118.192,00)
5.1.2.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	70.533.000,00	0,00	58.944.808,00	58.944.808,00	(11.588.192,00)
5.1.2.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat, Bermotor-Kendaraan Diras, Bermotor Perorangan	8.671.000,00	0,00	57.529.640,00	57.529.640,00	(2.918.036,00)
5.1.2.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat, Bermotor-Kendaraan Bermotor, Penumpang	15.000.000,00	0,00	12.150.299,00	12.150.299,00	(2.849.701,00)
5.1.2.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat, Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	14.328.000,00	0,00	11.176.545,00	11.176.545,00	(3.151.455,00)
5.1.2.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.876.000,00	0,00	11.525.000,00	11.525.000,00	(1.351.000,00)
5.1.2.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	19.638.000,00	0,00	18.340.000,00	18.340.000,00	(1.318.000,00)
5.1.2.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36.050.000,00	0,00	35.520.000,00	35.520.000,00	(530.000,00)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / (KURANG)
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
5.1.2.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	25.000.000,00	0,00	24.520.000,00	24.520.000,00	(480.000,00)
5.1.2.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Parkir	11.050.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	(50.000,00)
5.1.2.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.339.108.000,00	0,00	1.095.628.400,00	1.095.628.400,00	(243.479.600,00)
5.1.2.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.339.108.000,00	0,00	1.095.628.400,00	1.095.628.400,00	(243.479.600,00)
5.1.2.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	984.460.000,00	0,00	899.040.000,00	899.040.000,00	(85.420.000,00)
5.1.2.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	354.648.000,00	0,00	196.588.400,00	196.588.400,00	(158.059.600,00)
5.1.5	Belanja Hibah	717.713.000,00	0,00	717.713.000,00	717.713.000,00	0,00
5.1.5.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Bertujuan Hukam Indonesia	717.713.000,00	0,00	717.713.000,00	717.713.000,00	0,00
5.1.5.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Diberikut Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	717.713.000,00	0,00	717.713.000,00	717.713.000,00	0,00
5.1.5.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Diberikut Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	717.713.000,00	0,00	717.713.000,00	717.713.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	184.433.300,00	0,00	180.300.000,00	180.300.000,00	(4.133.300,00)
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.433.300,00	0,00	180.300.000,00	180.300.000,00	(4.133.300,00)
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	65.112.800,00	0,00	62.755.000,00	62.755.000,00	(2.357.800,00)
5.2.2.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.800.000,00	0,00	1.464.000,00	1.464.000,00	(336.000,00)
5.2.2.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Juri	1.800.000,00	0,00	1.464.000,00	1.464.000,00	(336.000,00)
5.2.2.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	63.312.800,00	0,00	61.291.000,00	61.291.000,00	(2.021.800,00)
5.2.2.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	6.168.000,00	0,00	6.168.000,00	6.168.000,00	0,00
5.2.2.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	57.144.800,00	0,00	55.123.000,00	55.123.000,00	(2.021.800,00)
5.2.2.10	Belanja Modal Komputer	119.320.500,00	0,00	117.545.000,00	117.545.000,00	(1.775.500,00)
5.2.2.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	108.124.000,00	0,00	106.700.000,00	106.700.000,00	(1.424.000,00)
5.2.2.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	108.124.000,00	0,00	106.700.000,00	106.700.000,00	(1.424.000,00)
5.2.2.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.196.500,00	0,00	10.845.000,00	10.845.000,00	(351.500,00)
5.2.2.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	4.020.000,00	0,00	3.745.000,00	3.745.000,00	(275.000,00)
5.2.2.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	7.176.500,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	(76.500,00)
	SURPLUS / DEFISIT	(15.500.295.282,00)	0,00	(12.754.259.875,92)	(12.754.259.875,92)	2.746.035.406,08
	SISA LEBIH/KURANG PEMBAYARAN TAHUN BERKENAAN	(15.500.295.282,00)	0,00	(12.754.259.875,92)	(12.754.259.875,92)	2.746.035.406,08

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBUDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
8	BELANJA DAERAH	18.621.649.267,00	16.914.547.719,00	90,83	12.764.250.875,92
8.1	BELANJA OPERASI	18.621.649.267,00	16.914.547.719,00	90,83	12.764.250.875,92
5.1.01	Belanja Pegawai	3.974.662.311,00	3.742.314.991,00	94,15	3.111.421.000,97
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.660.696.549,00	1.997.092.969,00	75,05	1.393.117.437,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.585.513.409,00	1.400.031.108,00	88,31	1.139.913.198,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.585.513.409,00	1.400.031.108,00	88,31	1.139.913.198,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	135.240.142,00	140.354.803,00	103,78	104.409.764,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	135.240.142,00	140.354.803,00	103,78	104.409.764,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	199.246.140,00	178.009.903,00	89,34	47.199.631,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	199.246.140,00	178.009.903,00	89,34	47.199.631,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Pensiunan Cincin ASN	20.424.500,00	24.112.000,00	118,11	43.730.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Pensiunan Cincin PNS	20.424.500,00	24.112.000,00	118,11	43.730.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Biaya ASN	80.829.035,00	74.914.709,00	92,81	59.239.540,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Biaya PNS	80.829.035,00	74.914.709,00	92,81	59.239.540,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh Tunjangan Keluarga ASN	3.603.150,00	3.421.733,00	95,00	468.741,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh Tunjangan Keluarga PNS	3.603.150,00	3.421.733,00	95,00	468.741,00
5.1.01.01.08	Belanja Perumahan Gaji ASN	20.157,00	19.420,00	96,34	14.940,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Perumahan Gaji PNS	20.157,00	19.420,00	96,34	14.940,00
5.1.01.01.09	Belanja Insan Jantung Kesehatan ASN	70.200.449,00	67.638.639,00	96,34	0,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Insan Jantung Kesehatan PNS	70.200.449,00	67.638.639,00	96,34	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Insan Jantung Kesehatan Kerja ASN	3.370.173,00	3.301.877,00	97,95	0,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Insan Jantung Kesehatan Kerja PNS	3.370.173,00	3.301.877,00	97,95	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Insan Jantung Kesehatan ASN	10.110.533,00	9.645.640,00	95,35	0,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Insan Jantung Kesehatan PNS	10.110.533,00	9.645.640,00	95,35	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.762.794.982,00	1.635.652.014,00	92,80	1.333.883.373,97
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Besaran Kerja ASN	1.762.794.982,00	1.635.652.014,00	92,80	811.975.780,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Besaran Kerja PNS	1.762.794.982,00	1.635.652.014,00	92,80	811.975.780,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Besaran Kerja ASN	0,00	0,00	0,00	924.887.423,97
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Besaran Kerja PNS	0,00	0,00	0,00	924.887.423,97
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Besaran Kerja Pegawai Lain ASN	211.200.000,00	209.770.000,00	99,32	200.430.000,00
5.1.01.03.01	Belanja Honorarium	211.200.000,00	209.770.000,00	99,32	200.430.000,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Honorarium Pegawai non-pegawai Pemerintah Kabupaten	182.110.000,00	181.200.000,00	99,50	181.200.000,00
5.1.01.03.01.0002	Belanja Honorarium Pegawai non-pegawai Pemerintah Kabupaten	29.090.000,00	28.570.000,00	100,00	6.120.000,00
5.1.02	Belanja Bantuan dari Jasa	14.646.813.836,00	12.764.107.736,00	87,13	6.772.873.887,66
5.1.02.01	Belanja Bantuan	2.566.842.772,00	1.971.061.181,00	76,79	1.266.596.488,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bantuan Paket Paket	3.646.842.772,00	1.971.061.181,00	53,81	264.893,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bantuan-Bantuan Bekerja dan Penerimaan	130.500.682,00	105.899.750,00	81,14	90.714.943,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bantuan-Bantuan Biaya Transportasi	121.645.000,00	37.970.000,00	31,23	0,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bantuan Gaji Taklukkan	131.400,00	115.000,00	87,52	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bantuan-Bantuan Lainnya	47.942.500,00	40.279.000,00	84,02	33.387.133,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00	8.513.050,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Komunikasi	1.390.000,00	1.294.109,00	93,07	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat-Bahan-bahan Kebutuhan Kantor/ Kantor Tulis Kantor	98.070.000,00	91.211.836,00	93,00	97.074.500,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat-Bahan-bahan Kebutuhan Kantor/ Kantor Tulis Kantor	44.062.700,00	43.703.540,00	99,17	22.830.000,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat-Bahan-bahan Kebutuhan Kantor/ Kantor Tulis Kantor	299.323.600,00	256.858.896,00	85,81	209.929.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat-Bahan-bahan Kebutuhan Kantor/ Kantor Tulis Kantor	11.390.000,00	10.560.000,00	92,69	11.380.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat-Bahan-bahan Kebutuhan Kantor/ Kantor Tulis Kantor	28.257.400,00	28.104.059,00	99,45	2.150.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat-Bahan-bahan Kebutuhan Kantor/ Kantor Tulis Kantor	0,00	0,00	0,00	16.642.300,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat-Bahan-bahan Kebutuhan Kantor/ Kantor Tulis Kantor	6.423.600,00	6.396.000,00	99,61	7.143.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat-Bahan-bahan Kebutuhan Kantor/ Kantor Tulis Kantor	29.644.200,00	29.293.300,00	98,84	864.000,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat-Bahan-bahan Kebutuhan Kantor/ Kantor Tulis Kantor	33.388.000,00	27.996.000,00	83,88	32.213.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat-Bahan-bahan Kebutuhan Kantor/ Kantor Tulis Kantor	174.180.000,00	170.243.500,00	97,76	84.300.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat-Bahan-bahan Kebutuhan Kantor/ Kantor Tulis Kantor	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	52.774.500,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Perawatan untuk Dijual/Ditawarkan/Perawatan untuk Dijual/Ditawarkan/Perawatan	56.125.000,00	51.738.750,00	92,18	0,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Nanas dan Pakan Nanas	31.572.000,00	31.567.500,00	99,99	46.273.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.202.255.000,00	872.511.000,00	72,57	553.884.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Paksiwa Dinas Lapangan (PDS)	15.000.000,00	2.400.000,00	16,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Paksiwa Untuk Tambahan	244.500.000,00	161.475.000,00	65,64	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	10.477.817.044,00	9.428.226.751,00	90,13	6.268.136.191,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	4.471.818.948,00	4.064.076.967,00	90,89	3.144.503.125,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembicara, Moderator, Pembicara Acara, dan Pembaca	1.327.410.000,00	1.121.300.000,00	84,53	171.300.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	495.000.000,00	451.010.000,00	91,11	1.548.510.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Acara	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Pembaca Berita Sesi Tagar/ Pemasar, Kebutuhan atau Sesi	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	823.250.000,00	773.330.000,00	93,93	990.310.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	117.300.000,00	117.300.000,00	100,00	108.950.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.489.000,00	6.864.000,00	91,67	13.000.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00	71.830.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanatan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informatika dan Teknologi	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konsumsi Aplikasi/Konsumi Belanja	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	1.228.000.000,00	1.183.479.333,00	96,36	76.020.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Bekerja/Bekerja, Pita, dan Perawatan	50.000.000,00	49.950.000,00	99,90	0,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Tagihan	1.200.000,00	99.802,00	8,23	215.050,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	753.400,00	395.116,00	52,41	422.300,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	93.499.248,00	81.733.876,00	87,44	49.220.673,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Koneksi/Perawatan/Service/ Perbaikan	430.999,00	105.000,00	24,36	600.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Perawatan Desa	0,00	0,00	0,00	14.148.400,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pemeliharaan Pabrik, Bus, dan Perawatan	13.850.000,00	6.141.400,00	44,39	1.997.300,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lainnya	360.108.000,00	288.327.000,00	80,07	213.059.000,00

5.1.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.675.868.096,00	5.084.747.784,00	89,59	3.123.553.066,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00	1.873.273.826,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.142.386.096,00	2.391.741.356,00	82,48	0,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	2.533.482.000,00	2.493.006.428,00	98,40	1.250.279.243,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	216.330.000,00	167.975.000,00	77,65	0,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	164.220.000,00	117.600.000,00	71,61	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	45.850.000,00	44.375.000,00	96,78	0,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.260.000,00	6.000.000,00	95,85	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	91.700.000,00	79.430.000,00	84,77	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Temporer Pertemuan	38.500.000,00	27.750.000,00	72,08	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	55.200.000,00	51.680.000,00	93,62	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	103.500.000,00	86.862.340,00	83,92	94.464.808,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	95.500.000,00	79.613.580,00	83,37	38.944.808,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Darat Bermotor Perorangan	40.000.000,00	33.947.080,00	99,87	5.752.964,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00	12.156.299,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.000.000,00	9.956.500,00	99,57	11.176.543,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.000.000,00	9.985.000,00	99,85	11.525.000,00
5.1.02.03.02.0212	Belanja Pemeliharaan Alat Kelektoran dan Kesehatan-Alat Kelektoran-Alat Kelektoran Kamar Jamban/Mortuary	15.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.000.000,00	9.970.000,00	99,70	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.000.000,00	9.855.000,00	98,55	0,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	18.340.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	35.520.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Temporer Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00	24.520.000,00
5.1.02.03.03.0033	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Temporer Kerja-Bangunan Paksi	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.000.000,00	7.248.760,00	90,61	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	3.000.000,00	2.883.760,00	96,13	0,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	5.000.000,00	4.365.000,00	87,30	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.356.754.000,00	1.129.891.481,00	83,28	1.095.628.400,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.356.754.000,00	1.129.891.481,00	83,28	1.095.628.400,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.688.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	902.840.000,00	721.252.000,00	79,89	899.040.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	443.226.000,00	408.639.481,00	92,20	196.588.400,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Luar/Masyarakat	161.700.000,00	145.062.975,00	89,71	0,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Luar/Masyarakat	161.700.000,00	145.062.975,00	89,71	0,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	161.700.000,00	145.062.975,00	89,71	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	717.713.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Komunitas yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	0,00	0,00	717.713.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	717.713.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	717.713.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	18.621.475.367,00	16.583.622.719,00	88,63	12.573.959.875,92
5.2	BELANJA MODAL	11.170.000,00	10.925.000,00	97,81	180.380.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.170.000,00	10.925.000,00	97,81	180.380.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.170.000,00	10.925.000,00	97,81	69.855.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	1.464.000,00
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jambak	0,00	0,00	0,00	1.464.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.170.000,00	10.925.000,00	97,81	68.391.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	10.270.800,00	10.058.000,00	97,93	6.168.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	899.200,00	867.000,00	96,42	7.100.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00	55.123.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	0,00	110.445.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	106.700.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	106.700.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	3.745.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	3.745.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	11.170.000,00	10.925.000,00	97,81	180.380.000,00
	JUMLAH BELANJA	18.632.645.367,00	16.594.547.719,00	88,63	12.754.339.875,92

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
	SURPLUS/DEFISIT	(18.632.645.367,00)	(16.514.547.719,00)	88,63	(12.754.259.875,92)

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri





PEMERINTAHAN KAB. JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	15.925.921.582	14.974.680.204,00	94,03	16.514.547.719,00
5.1	BELANJA OPERASI	15.880.016.132	14.932.725.208,00	94,03	16.503.622.719,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.077.069.832	3.672.416.666,00	90,07	3.742.514.991,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.091.755.932	1.857.466.636,00	88,80	1.897.092.960,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.491.474.712	1.372.274.274,00	92,01	1.400.031.106,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.491.474.712	1.372.274.274,00	92,01	1.400.031.106,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	133.888.188	131.943.448,00	98,55	140.354.888,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	133.888.188	131.943.448,00	98,55	140.354.888,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	181.350.008	179.030.000,00	98,72	178.809.900,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	181.350.008	179.030.000,00	98,72	178.809.900,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	27.104.420	23.465.000,00	86,57	24.115.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.104.420	23.465.000,00	86,57	24.115.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	82.137.608	79.299.900,00	96,55	74.954.700,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	82.137.608	79.299.900,00	96,55	74.954.700,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	7.197.960	2.186.941,00	30,38	1.621.735,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	7.197.960	2.186.941,00	30,38	1.621.735,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	20.888	15.023,00	71,92	19.420,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20.888	15.023,00	71,92	19.420,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	152.839.462	58.259.965,00	38,12	65.658.688,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	152.839.462	58.259.965,00	38,12	65.658.688,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.935.516	2.748.003,00	69,83	2.881.877,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	3.935.516	2.748.003,00	69,83	2.881.877,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	11.807.170	8.244.082,00	69,82	8.645.646,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	11.807.170	8.244.082,00	69,82	8.645.646,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.775.348.900	1.605.285.030,00	90,42	1.635.652.031,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.775.348.900	1.605.285.030,00	90,42	1.635.652.031,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.775.348.900	1.605.285.030,00	90,42	1.635.652.031,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	209.965.000	209.665.000,00	99,86	209.770.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	209.965.000	209.665.000,00	99,86	209.770.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	173.155.000	172.855.000,00	99,83	181.280.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengasah Barang/Jasa	36.810.000	36.810.000,00	100,00	28.490.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.345.971.300	10.883.333.542,00	95,92	12.761.107.728,00
5.1.02.01	Belanja Barang	836.364.350	774.383.250,00	92,56	1.971.061.181,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habisi	836.364.350	774.383.250,00	92,56	1.971.061.181,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	375.300	337.500,00	89,93	295.400,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	95.532.450	88.646.660,00	92,79	105.809.750,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0	0,00	0,00	57.970.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-lai Tabung Gas	0	0,00	0,00	115.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	8.000.000	3.662.000,00	45,78	40.219.800,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	995.500	990.000,00	99,45	1.294.189,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	36.183.300	33.476.800,00	92,51	91.211.836,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	36.834.500	36.159.200,00	98,17	437.835.488,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11.689.800	7.861.000,00	67,25	236.858.839,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4.272.000	4.099.000,00	95,74	10.590.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.859.300	7.297.000,00	92,85	28.101.059,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	14.239.800	14.210.300,00	99,79	0,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	5.859.600	5.794.100,00	98,88	6.396.650,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.557.300	4.380.000,00	78,82	29.281.360,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	5.945.000	5.900.000,00	99,24	27.996.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	43.387.800	42.317.800,00	97,53	170.245.590,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.614.900	2.351.400,00	89,92	1.200.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	20.000.000	19.990.000,00	99,50	51.738.750,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	30.860.800	30.840.990,00	99,94	31.567.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	469.307.000	429.163.590,00	91,45	872.511.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	37.048.000	36.975.000,00	99,80	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0	0,00	0,00	2.400.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	0	0,00	0,00	161.475.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.306.450.000	9.063.167.289,00	97,39	9.428.229.751,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.942.877.500	3.761.269.771,00	95,39	4.086.076.967,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.705.150.000	1.589.700.000,00	93,23	1.121.360.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	435.600.000	419.850.000,00	96,28	431.010.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	878.000.000	876.500.000,00	99,83	773.550.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	0	0,00	0,00	117.500.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	0	0,00	0,00	6.864.000,00

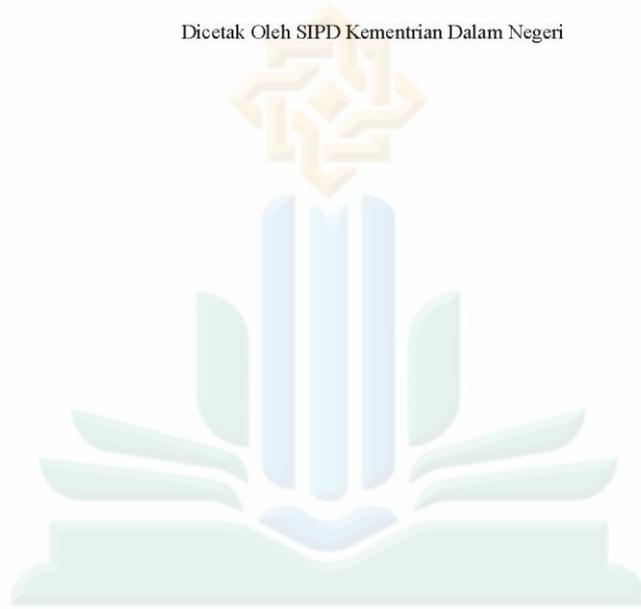
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0	0,00	0,00	52.600.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0	0,00	0,00	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	590.001.000	567.148.700,00	96,13	1.163.479.373,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Raidame, Film, dan Pemotretan	0	0,00	0,00	49.950.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	300.000	0,00	0,00	99.002,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	481.500	467.136,00	97,02	395.116,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	97.152.000	92.357.835,00	95,07	81.755.876,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	21.360.000	20.784.500,00	97,31	105.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.000.000	2.730.600,00	19,50	6.141.600,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembar	200.833.000	191.731.000,00	95,47	288.327.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	5.353.612.500	5.298.270.333,00	98,97	5.084.747.784,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.820.000.000	2.790.824.360,00	98,97	0,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	2.528.784.000	2.502.850.860,00	98,97	2.591.741.356,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	4.828.500	4.595.113,00	95,17	2.493.006.428,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	167.975.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0	0,00	0,00	117.600.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0	0,00	0,00	44.375.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0	0,00	0,00	6.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	9.960.000	3.627.185,00	36,42	79.430.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	0,00	0,00	27.750.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	9.960.000	3.627.185,00	36,42	51.680.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	138.724.350	131.487.934,00	94,78	86.862.340,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	90.000.000	83.730.813,00	93,03	79.613.580,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0,00	0,00	39.947.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	50.000.000	44.030.813,00	88,06	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.000.000	9.930.000,00	99,30	9.956.500,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.000.000	9.795.000,00	97,95	9.885.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0	0,00	0,00	9.970.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	20.000.000	19.975.000,00	99,88	9.855.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	48.724.350	47.757.121,00	98,01	0,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	48.724.350	47.757.121,00	98,01	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Injeksi	0	0,00	0,00	7.248.760,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	0	0,00	0,00	2.883.760,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan, Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	0	0,00	0,00	4.365.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1.052.232.600	902.325.069,00	85,75	1.129.891.481,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.052.232.600	902.325.069,00	85,75	1.129.891.481,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	388.292.000	367.974.449,00	94,69	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	663.640.000	534.350.620,00	80,52	721.252.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	0,00	0,00	408.639.481,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000	12.000.000,00	100,00	145.062.975,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.000.000	12.000.000,00	100,00	145.062.975,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hibah yang Berifat Pertolongan	12.000.000	12.000.000,00	100,00	145.062.975,00
5.1.05	Belanja Hibah	456.975.000	376.975.000,00	82,49	0,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berwujud Hukam Indonesia	456.975.000	376.975.000,00	82,49	0,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Berifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Undang-undang	376.975.000	376.975.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Berifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Undang-undang	376.975.000	376.975.000,00	100,00	0,00
5.1.05.05.05	Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	80.000.000	0,00	0,00	0,00
5.1.05.05.05.0001	Belanja Hibah Uang kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	80.000.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	15.880.016.132	14.932.725.208,00	94,63	16.503.622.719,00
5.2	BELANJA MODAL	45.905.450	41.954.996,00	91,39	10.925.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.905.450	41.954.996,00	91,39	10.925.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.368.900	5.229.999,00	70,97	10.925.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.822.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.822.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	5.546.900	5.229.999,00	94,29	10.925.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	5.546.900	5.229.999,00	94,29	10.058.000,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	0	0,00	0,00	867.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	38.536.550	36.724.997,00	95,30	0,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	38.536.550	36.724.997,00	95,30	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	38.536.550	36.724.997,00	95,30	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	45.905.450	41.954.996,00	91,39	10.925.000,00
	JUMLAH BELANJA	15.925.921.582	14.974.680.204,00	94,63	16.514.547.719,00
	SURPLUS/DEFISIT	(15.925.921.582)	(14.974.680.204,00)	94,63	(16.514.547.719,00)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
---------------	--------	---------------	----------------	--------	----------------

Kab. Jember, 21 September 2024
Krpka DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

ADI WIJAYA, S.STP, M.Si
NIP. 197703251996031004

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakisan Damar Lapangan (PDL)	12.750.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakisan Aduar Daerah	15.000.000	1.800.000,00	12,00	0,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakisan Batik Tradisional	25.000.000	24.750.000,00	99,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	9.493.361.917	4.055.535.457,00	42,72	9.063.167.289,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.638.694.420	653.704.789,00	17,97	3.761.269.771,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.712.200.000	0,00	0,00	1.589.700.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksanaan Kegiatan	450.700.000	7.650.000,00	1,70	419.850.000,00
Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	913.400.000	521.150.000,00	57,06	876.500.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.400.000	1.450.000,00	60,42	0,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	290.000.000	0,00	0,00	567.148.700,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	14.952.420	13.774.821,00	92,12	467.136,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	93.840.000	47.531.168,00	50,65	92.357.835,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Koneksi/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	900.000	150.000,00	16,67	20.784.500,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Penyewaan Pajak, Bus, dan Petrolain	8.500.000	1.613.800,00	18,99	2.730.600,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembar	151.802.000	60.385.000,00	39,78	191.731.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Jaminan Asuransi	5.854.667.497	3.401.850.668,00	58,10	5.258.270.333,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.327.065.877	1.940.098.120,00	58,31	2.798.834.360,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	0	0,00	0,00	2.502.850.860,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Jaminan Kesehatan Kerja bagi Non ASN	11.260.021.908	651.344.323,00	5,78	4.595.113,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.401.640.512	81.048.225,00	5,78	0,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	0	0,00	0,00	3.627.185,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	0	0,00	0,00	3.627.185,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	91.761.050	64.718.150,00	70,53	131.487.934,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perakitan dan Mesin	80.000.000	64.718.150,00	80,90	83.730.813,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penunjang	35.000.000	32.206.650,00	92,02	44.030.813,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.000.000	9.153.500,00	91,54	9.930.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.000.000	5.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.000.000	5.783.000,00	57,83	9.795.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	10.000.000	7.275.000,00	72,75	0,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	10.000.000	5.300.000,00	53,00	19.975.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	11.761.050	0,00	0,00	47.757.121,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	11.761.050	0,00	0,00	47.757.121,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	869.106.000	285.954.671,00	32,90	902.325.069,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	869.106.000	285.954.671,00	32,90	902.325.069,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	478.626.000	205.064.671,00	42,84	367.974.449,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	255.880.000	80.890.000,00	31,61	534.358.620,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	134.600.000	0,00	0,00	0,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hibah yang Bersifat Perforansian	0	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	0	0,00	0,00	376.975.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, yang Berdasarkan Hukum Indonesia	0	0,00	0,00	376.975.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00	0,00	376.975.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0	0,00	0,00	376.975.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	15.620.422.067	7.520.442.093,00	46,86	14.952.725.208,00
5.2	BELANJA MODAL	52.987.400	0,00	0,00	41.954.996,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.987.400	0,00	0,00	41.954.996,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	44.687.400	0,00	0,00	5.229.999,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	9.035.800	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyempurnaan Peralengkapan Kantor	6.085.600	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	2.950.200	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	16.500.000	0,00	0,00	5.229.999,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	16.500.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0	0,00	0,00	5.229.999,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Mesa dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	19.151.600	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	19.151.600	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	8.300.000	0,00	0,00	36.724.997,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	0	0,00	0,00	36.724.997,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	0	0,00	0,00	36.724.997,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	8.300.000	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	8.300.000	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	52.987.400	0,00	0,00	41.954.996,00
	JUMLAH BELANJA	15.673.409.467	7.520.442.093,00	46,71	14.974.680.204,00

	SURPLUS/DEFISIT	(15.673.409,467)	(7.320.442.093,00)	46,71	(14.974.680.204,00)

Kab. Jember, 17 September 2024
Kepala DINAS
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

ADIWIJAYA, S.STP, M.Si
NIP. 197703251996031004

Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN 4 JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Uraian Kegiatan
1	7 September 2024	Pengajuan Judul
2	11 September 2024	Acc Judul Skripsi
3	12 September 2024	Penyusunan Proposal
4	27 September 2024	Acc Proposal Skripsi
5	29 Oktober 2024	Seminar Proposal
6	9 Januari 2025	Penyerahan Surat Izin Penelitian
7	10 Januari 2025 – 17 Januari 2025	Analisis Data
8	18 Januari 2025 – 25 Januari 2025	Penyusunan Naskah Skripsi
9	30 Januari 2025	Acc Skripsi
10	30 Januari 2025	Pengambilan Surat Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

LAMPIRAN 5 KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nailatul Karimah
NIM : 212105030078
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 04 Februari 2025

Saya yang menyatakan



Nailatul Karimah

NIM. 212105030078

LAMPIRAN 6 SK IZIN PENELITIAN

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM</p> <p>Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: https://febi.uinkhas.ac.id/</p>	 										
<hr/>												
Nomor	: B-39 /Un.22/7.a/PP.00.9/01/2025	09 Januari 2025										
Lampiran	: -											
Hal	: Permohonan Izin Penelitian											
<p>Kepada Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Jl. Jawa, Tegal Boto Lor, Sumbersari Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121</p> <p>Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :</p> <table border="0"> <tr> <td>Nama</td> <td>: Nailatul Karimah</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 212105030078</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: VII (Tujuh)</td> </tr> <tr> <td>Jurusan</td> <td>: Ekonomi Islam</td> </tr> <tr> <td>Prodi</td> <td>: Akuntansi Syariah</td> </tr> </table> <p>Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Implementasi Konsep Value For Money Dalam Penilaian Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.</p> <p>Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.</p>			Nama	: Nailatul Karimah	NIM	: 212105030078	Semester	: VII (Tujuh)	Jurusan	: Ekonomi Islam	Prodi	: Akuntansi Syariah
Nama	: Nailatul Karimah											
NIM	: 212105030078											
Semester	: VII (Tujuh)											
Jurusan	: Ekonomi Islam											
Prodi	: Akuntansi Syariah											
<p>A.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,  Nurul Widyawati Islami Rahayu</p> 												
												

LAMPIRAN 7 SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 Jalan Jawa Nomor 26 Jember, Telepon (0331) 322870 Jember 68121,
 Laman dpmjemberkab.go.id, Pos-el dpmjemberkab.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR: 800/105/35.09.321/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI WIJAYA, S.STP, M. Si
 NIP : 19770325 199603 1 004
 Pangkat / golongan ruang : Pembina Tk. I / IV (b)
 Jabatan : Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Menerangkan bahwa:

Nama : Nailatul Karimah
 NIM : 212105030078
 Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam Akuntansi Syariah UIN KHAS Jember
 Judul Penelitian : Implementasi Konsep Value For Money dalam
 Penilaian Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat dan Desa Kab. Jember

Telah menyelesaikan Penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Jember yang dilaksanakan pada tanggal 10 - 17 Januari 2025.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana
 mestinya.

Jember, 16 Januari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
 Masyarakat Dan Desa,



Adi Wijaya, S.STP, M.Si
 Pembina Tk. I / IV/b
 NIP. 19770325 199603 1 004

LAMPIRAN 9 SK LULUS PLAGIASI

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM	 
	Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: http://uinkhas.ac.id	

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : NAILATUL KARIMAH
 NIM : 212105030078
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Judul : Implementasi Konsep Value of Money dalam penilaian Kinerja Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember.

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Drillbit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Drillbit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 31 Januari 2025
 Operator Drillbit
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

 Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag, M.EI
 NIP. 197709142005012004



BIODATA PENELITI

Nama : Nailatul Karimah
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 17 Juli 2003
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : RT01/RW02, Dusun Krajan, Desa
 Klungkung, Kecamatan Sukorambi,
 Kabupaten Jember.
 Agama : Islam
 E-mail : Karimahnailatul7@gmail.com
 Nomer HP : 0821-4141-2920
 Jurusan : Ekonomi Islam
 Program Studi : Akuntansi Syariah
 Riwayat Pendidikan : SDN Slawu 03
 SMP Nurul Jadid
 SMA Nurul Jadid
 UIN KHAS JEMBER